



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

# FOCUS GROUP DISCUSSION

FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT

PROVINSI DAN KABUPATEN /KOTA  
SE-KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023



BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENANGANAN KONFLIK



PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

# FOCUS GROUP DISCUSSION

FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT

PROVINSI DAN KABUPATEN /KOTA  
SE-KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023



SEBAGAI INTELIJEN DI DAERAH\*

PONTIANAK, 12 JULI 2023



BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENANGANAN KONFLIK

## KATA PENGANTAR

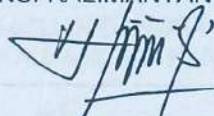
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

1. meningkatkan kewaspadaan dini melalui kolaborasi antara peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan partisipasi Masyarakat demi terwujudnya stabilitas daerah dan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah;
2. meningkatkan dan mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat se-Kalimantan Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas pada masa yang akan datang.

Pontianak, Juli 2023  
KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HERI SYAFARUDDIN, SE., ME  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196705291989021002

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

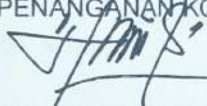
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan kegiatan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan kinerja dan anggaran secara layak sesuai dengan akuntabilitas kinerja.

Pontianak, Juli 2023

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL  
DAN PENANGANAN KONFLIK




HERI SYAFARUDDIN, SE., ME

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196705291989021002

Mengetahui :

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Drs. MANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670221 198603 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Penyelenggaraan (Dasar Hukum) .....	2
C. Tujuan .....	3
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	3
E. Organisasi Penyelenggara .....	4
<b>BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	6
A. Bentuk Kegiatan .....	6
B. Narasumber .....	6
C. Kepesertaan .....	7
D. Jadwal penyelenggaraan .....	7
E. Resume Kegiatan .....	8
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHAN</b> ....	16
A. Masalah yang dihadapi .....	16
B. Upaya yang dilakukan .....	16
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	19
A. Kesimpulan .....	19
B. Saran .....	19
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
Dokumentasi	
Keputusan Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kesbangpol	
Sambutan Pejabat Pembuka	
Laporan Penyelenggara	
Materi Narasumber	
Undangan Kegiatan	
Daftar Hadir	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242  
Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

---

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
FOCUS GROUP DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

**BAB I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Stabilitas keamanan yang kondusif merupakan cita-cita dari seluruh negara, demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berupaya untuk melaksanakan tujuan negara yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, kondisi keamanan yang stabil dan kondusif merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan negara yang telah ditetapkan.

Peningkatan kewaspadaan dini melalui kolaborasi yang terintegrasi di Kalimantan Barat antara Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, harus terus diupayakan sehingga dengan penerapan strategi tersebut diharapkan akan meningkatkan kolaborasi kewaspadaan dini demi terwujudnya stabilitas keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiapan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disebut FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Tugas dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasi data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini.
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan masyarakat.

#### B. DASAR PENYELENGARAAN (DASAR HUKUM)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1707/KESBANGPOL/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 313/KESBANGPOL/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1707/KESBANGPOL/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

#### C. TUJUAN

Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

- a. meningkatkan kewaspadaan dini melalui kolaborasi antara peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan partisipasi Masyarakat demi terwujudnya stabilitas daerah dan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah;
- b. meningkatkan dan mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat se-Kalimantan Barat.

#### D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 bertempat di Ruang Smokey Quartz Lantai C Hotel Golden Tulip Jl. Teuku Umar Pontianak.



## E. ORGANISASI PENYELENGGARA (PERSONIL YANG TERLIBAT DAN TUGASNYA)

Tim pelaksana yang ditugaskan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat adalah pejabat, staf dan tenaga kontrak di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

Adapun tugas dari Tim pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab :
  - a. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Memberikan saran atau masukan dan monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan;
  - c. Menetapkan persetujuan atas Rencana dan Jadwal Kegiatan;
2. Ketua :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - b. Melakukan evaluasi dan meminta laporan pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota panitia pelaksana.
3. Sekretaris :
  - a. Menginventarisir urusan pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - b. Mendukung kelancaran tugas-tugas administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. Menyusun laporan data Pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

4. Anggota :
- a. Menghimpun atau menginvetarisir bahan pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,
  - b. Mendukung kelancaran tugas-tugas administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,
  - c. Mengadministrasikan surat menyurat berkenaan dengan pelaksanaan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat,
  - d. Menyusun bahan-bahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Rapat *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

## BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, dilaksanakan dengan metode melibatkan secara aktif peserta kegiatan melalui :

#### 1. Pemberian Materi

Materi diberikan oleh 4 (empat) orang narasumber yaitu dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sanggau dan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Melawi yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peran serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai salah satu ujung tombak pencegahan dini di masyarakat.

#### 2. Dialog / Diskusi Terbuka

Setelah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari para narasumber dilanjutkan dengan forum diskusi dan Tanya jawab antara peserta dan narasumber.

### B. NARASUMBER

Untuk memberikan pengetahuan dan gambaran umum tentang upaya pencegahan dini dan meminimalisasi terhadap adanya benturan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan menghambat pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat melibatkan Ketua FKDM yang mempunyai Tupoksi dalam upaya untuk mendukung terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa melalui peran serta masyarakat, dan bertindak selaku Narasumber dalam proses diskusi dan dialog yang diselenggarakan.

Adapun Narasumber Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat yaitu :

1. Heri Syafaruddin, SE., ME (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat) dengan materi Peran FKDM sebagai intelijen di daerah.
2. Prof. Dr. Chairil Effendi, MS (Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Barat) dengan materi Rencana Program Kerja FKDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
3. AKBP Purn. Marsianus Ajau (Wakil Ketua FKDM Kabupaten Sanggau) dengan materi Rencana Program Kerja FKDM Kabupaten Sanggau Tahun 2024.
4. H. Yeshil Leban, S.Pd., M.Si (Ketua FKDM Kabupaten Melawi) dengan materi Rencana Program Kerja FKDM Kabupaten Melawi Tahun 2024.

#### C. KEPESERTAAN

Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini diikuti oleh Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat se-Kalimantan Barat.

#### D. JADWAL PENYELENGGARAAN

Dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 bertempat di Ruang Smokey Quartz Lantai C Hotel Golden Tulip Jl. Teuku Umar Pontianak dengan susunan acara :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Pembacaan Do'a.
4. Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

5. Sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sekaligus membuka acara
6. Pemaparan Materi
7. Diskusi dan Tanya jawab
8. Penutup.

#### E. RESUME KEGIATAN

1. Laporan ketua panitia.

Maksud dan tujuan kegiatan untuk melakukan diskusi untuk sinkronisasi program dan kegiatan FKDM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat.

2. Sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan perpanjangan tangan intelijen di daerah.

Berbicara tentang masalah ATHG pasti diperlukan kewaspadaan dini. Sebagai contoh ancaman kewaspadaan dini di Kalimantan Barat : kabut asap, banjir, puting beliung, gempa. Kemudian dilanjutkan dengan pandemi Covid-19 dimana kita banyak mengalami kendala dalam menangani ancaman itu dan ada yang tidak setuju penanganan dengan vaksin dan sebagainya.

Yang dikhawatirkan adalah ATHG merupakan sesuatu yang masih dalam mengukur, kebanyakan ini terkait dengan isu sosial. Kita dihadapkan dengan masalah yang dipandang dari sisi yang berbeda, memandang dari persepektif yang berbeda sehingga menjadi ancaman. Dalam kontek global kondisi semacam ini sering digunakan pihak asing untuk melakukan propaganda dan melemahkan negara kita. Terutama terhadap sumber daya ekonomi.

Sumber kekayaan alam suatu Negara tidak semua merupakan anugrah tapi bisa menjadi musibah Negara-negara yang kaya SDA menarik bagi mereka untuk melakukan kolonisasi. Kita merupakan negara korban kolonialisme. Ini contoh sumber daya alam sebagai musibah. Tapi tidak sedikit negara-negara yang menjadikan sda sebagai anugrah.

a. PERAN FKDM SEBAGAI INTELIJEN DI DAERAH

Latar belakang :

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara serta Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara dan Perkabin Nomor 01 Tahun 2014 dimana seluruh kegiatan Intelijen dikoordinasikan oleh BINDA.
- Permendagri 11 Tahun 2006 Jo Permendagri 16 Tahun 2011 Tentang Kominda
- Permendagri 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah
- Permendagri No.02 Tahun 2018 Dan Permendagri 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

b. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

1) Provinsi

- Kewaspadaan dini di Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur
- Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi
- Membentuk FKDM Provinsi

2) Kabupaten/ Kota

- Kewaspadaan Dini di Kabupaten/Kota menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati/Walikota
- Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kab/Kota
- Membentuk FKDM Kab/Kota

### 3) Kecamatan

- Kewaspadaan Dini Di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat
- Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kecamatan
- Membentuk FKDM Kecamatan

Kewaspadaan Dini : Serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

Potensi ATHG yang perlu diantisipasi di Provinsi Kalimantan Barat :

- Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya
- Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis
- Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.
- Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha
- Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat

#### c. Pembentukan FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)

- ✓ FKDM Dibentuk di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- ✓ Pembentukan FKDM dilakukan oleh Masyarakat & ditetapkan oleh Pemda
- ✓ FKDM memiliki hub yg bersifat konsultatif dan merupakan akses informasi bagi Tim Kewaspadaan Dini Pemda
- ✓ FKDM sebagai akses informasi berkoordinasi dan memberikan info kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemda.

- ✓ Keanggotaan FKDM Prov, FKDM Kabupaten/Kota, dan FKDM Kecamatan, FKDM Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan terdiri dari : wakil ormas, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, atau elemen masyarakat lainnya

Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) :

- Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
- Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur, bupati/walikota, camat atau lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat antara lain :
  1. Sebagai ujung tombak dalam pengumpulan informasi terkait dengan potensi ancaman didaerahnya
  2. Sebagai mata dan telinga serta membantu penyelenggaraan pemerintahan didaerah
  3. Membantu pencegahan awal terhadap ancaman didaerahnya.
  4. Sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
  5. Temu Cepat dan Lapor Cepat

Sistem temu cepat dan lapor cepat bagi FKDM

- Fungsi deteksi dini : koordinasi dengan forum2 dan jaringan komunitas intelijen secara optimal, karena hal tsb merupakan fungsi yang sangat sentral dalam upaya pencegahan dini terhadap gangguan-gangguan dalam masyarakat.
- Perspektif intelijen : penyelidikan yang menggunakan metoda deteksi dini (temu cepat) dan prinsip "velox at exatus" (cepat dan akurat) dalam pelaporan (lapor cepat), maka intelijen dapat terhindar dari pencedakan. Demikian halnya dengan FKDM, jika prinsip "temu cepat" dan "lapor cepat" menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi FKDM, maka peran FKDM menjadi sangat elementer dalam mengantisipasi datangnya ancaman.



- Fungsi kewaspadaan dini : kemampuan mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan cepat antara lain :
  1. Di bidang ideologi, fokus pada penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
  2. Di bidang politik, melakukan pemetaan kekuatan politik dan elemen yg berpengaruh terhadap dinamika politik, serta penataan peran masyarakat sipil (civil society).
  3. Di bidang ekonomi, mencermati fluktuasi kenaikan harga sembilan bahan pokok,
  4. Di bidang sosial dapat dilakukan dengan pemetaan daerah rawan pangan, rawan penyakit, rawan bencana alam, rawan penduduk, rawan kriminal dan lain-lain,
  5. Di bidang pertahanan keamanan dapat dilakukan dengan pemetaan daerah basis kriminal, membuat sistem keamanan lingkungan dan lain-lain

### 3. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah mendapatkan pencerahan dari narasumber dilanjutkan dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini, peserta dipersilahkan untuk bertanya kepada narasumber ini terjadi dialog antara peserta dan narasumber.

Pertanyaan dari peserta kepada narasumber

1. Syafaruddin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang :
  - Masalah program hampir semua daerah sama. Termasuk Masalah penanganan konflik, Masalah deteksi dini, kami kemarin mendeteksi masalah pilkades. Sekarang ini ada aliran keagamaan yang akan menghasilkan Bom waktu seperti Yayasan Al Zaitun, LDII dan lain-lain. Hal seperti ini akan merusak generasi selanjutnya. Kelemahan kita tidak pernah dibekali senjata. Saya baru 2 bulan mengelola kebijakan negara. Kalau menurut negara penting kesbangpol jangan diobok-obok seperti baru beberapa bulan sudah dipindahkan.

- Simantel dan permasalahan-permasalahan yang terjadi rekomendasinya kemana apakah ke bupati atau gubernur
  - Masalah pakem , ketapang luas
  - Ada 900 kendaraan mandeg di jalan , jadi bukan hanya masalah narkoba, judi online.
2. Silvanus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak :
- Ada 2 persoalan bagaimana mengurangi Money Politik di 2024 dan politik identitas. Solusi untuk politik uang mungkin akan berkurang jika ada yang memberikan uang ambil saja tapi pilihan terserah saja.
  - Waktu Sosialisasi kita memang dibaik-baiki oleh pengusaha. Sementara kenyataannya hasilnya tinggal 20% yang dibagikan ke masyarakat. Kalbar merupakan sasaran konglomerat di Jakarta.
3. Suwanto, FKDM Kabupaten Kubu Raya :
- ATHG kuncinya komunikasi
  - Ukhuwah Islamiyah, menjaga toleransi sebelum NKRI dulu adalah kerajaan-kerajaan NKRI masuk Tahun 78. Kita sebagai masyarakat NKRI wajib menjaga NKRI sebagaimana kita berkerja dengan tupoksi kita masing-masing. Di Era reformasi, saran di polres ada nomor kontak yang bisa dihubungi masyarakat agar masyarakat tidak segan melaporkan hal-hal mencurigakan.
4. Yacobus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang :
- Terkait pengelolaan keuangan FKDM perlu bendahara atau bagaimana.
  - Kami sarankan ada pendekatan di daerah ada trend pergeseran konflik.
  - Terkait ijin perkebunan hak ulayat tanah proses ketika dihadapkan pada penegakan hukum Lembaga masyarakat berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Tanggapan dari narasumber :

1. Prof. Dr. Chairil effendi, MS (Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Barat).
  - FKDM Provinsi rekomendasinya ke Gubernur, FKDM Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota.
  - Terkait Al Zaitun, kita tunggu penyelesaiannya, LDII ke MUI, Kemenag sudah menerbitkan Buku Referensi Tahun 2021 tentang aliran agama mana yang dianggap keliru dsb ada dalam buku tersebut.
  - Kita informasikan dan rekomendasikan ke Bupati/Gubernur eksekusinya mereka BIN. FKDM betul-betul mengabdikan diri ke masyarakat bantuan yang didapat bantuan program, kita bekerja sesuai aturan yang berlaku sesuai kewenangan yang diberikan kepada kita. Jangan terlalu kita pusingkan jangan terlalu jauh.
  - Terkait Politik Identitas tidak bisa kita hindari yang penting tidak menimbulkan konflik. Karakter bangsa kita memang seperti itu, kembali ke agama untuk menciptakan akhlak yang baik.
  - Terkait Money Politik, terkait petugas yang kelelahan dan meninggal, jangan berfikir macam-macam.
  - Banyak Forum baik sebagai ajang komunikasi maupun sebagai forum menyelesaikan masalah.
  - Konflik sosial yang seperti apa konflik sosial yang bisa menyebabkan kekerasan konflik perkebunan bisa termasuk konflik. Demo silahkan tapi jangan anarkis.
  - Jangan sampai terjadi konflik dengan kekerasan. Kita hanya dalam rangkaantisipasi.
  - Kita jangan sampai melangkahi kewenangan kita.
  
2. AKBP Marsianus Ajau (Wakil Ketua FKDM Kabupaten Sanggau).
  - Untuk penangan Masalah Narkoba sebaiknya tertutup jangan terbuka karna mereka dapat menyerang balik kita.
  - Dalam pemilu kita juga tidak bisa terbuka tapi gunakan cara tertutup karena keluarga kita juga ada yang mencalonkan. Lapor saja ke kesbangpol.

3. H. Yeshil Lekban, S.Pd., M.Si (Ketua FKDM Kabupaten Melawi).
  - Terkait money politik kita memilih orang yang sudah disodorkan mungkin itu bukan pilihan kita, tapi karena sudah disodorkan. Jangan lah kita terlalu fanatik sampai ada istilah cebong atau kadrin dan sebagainya.
  - Terkait politik identitas kita perlu itu tetapi yang penting jangan sampai menimbulkan konflik.
  
4. Heri Syafaruddin, SE., ME (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik).
  - Kita menyerahkan hibah kepada FKDM, selanjutnya laporan disampaikan oleh Kepala Badan kepada Gubernur Kalbar untuk disampaikan ke Kemendagri. Kita juga selalu mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan BINDA biasanya saya meminta informasi kepada FKDM yang bersangkutan untuk disampaikan kepada BINDA.

### BAB III. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMECAHAN

#### A. MASALAH YANG DIHADAPI

1. Bagaimana meminimalisir Money Politik dan Politik Identitas dalam mengantisipasi potensi kerawanan ATHG menjelang Pemilu.
2. Bagaimana mengantisipasi Masalah penanganan konflik, Masalah deteksi dini terkait ada aliran keagamaan yang akan menghasilkan bom waktu seperti Yayasan Al Zaitun, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan sebagainya.

#### B. UPAYA YANG DILAKUKAN

1. Money politic atau politik uang adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah money politik :

- a. Masyarakat harus dapat memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan praktik politik uang lainnya.
- b. Melakukan efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, membenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Politik identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Dampak dari politik identitas juga cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi.

Politik identitas yang tidak terkendali dapat mengakibatkan konflik SARA, fundamentalisme dan radikalisme agama, serta manuver politik yang penuh propaganda kebencian terhadap pihak lain.

Langkah pencegahannya :

- a. Mengantisipasi kemungkinan penggunaan politik identitas/SARA selama tahapan Pemilu 2024.
  - b. Bawaslu menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Agenda Pencegahan Politisasi Sara dan Hoax pada Pemilu Tahun 2024 bersama perwakilan Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi Banten, serta Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
  - c. Perlibatan tokoh agama sebelum tahapan kampanye bertujuan membentengi ummat. Selain itu, keberadaan tokoh agama selama Pemilu dapat menenangkan situasi krisis. Tokoh agama juga, lanjutnya, bisa memberi penjelasan apabila terjadi disinformasi yang berhubungan dengan politisasi SARA.
2. Untuk pencegahan masalah Pondok Pesantren Al Zaitun, sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah :
- Kemenag menerbitkan Buku Referensi Tahun 2021 tentang aliran agama mana yang dianggap keliru dsb ada dalam buku tersebut.
  - masalah hukum yang akan diselesaikan oleh POLRI.
  - masalah administrasi pendidikan akan terus dibina dan dipantau.
  - masalah keamanan, masalah sosial, dan masalah politis akan diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat bersama aparat.

- Pondok pesantrennya akan kita evaluasi secara administratif dengan mengevaluasi penyelenggaraannya, kurikulumnya, konten pengajarannya, dan sebagainya.

## BAB IV. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bahwa serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan melalui meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini tidak dapat dilakukan oleh satu elemen masyarakat saja namun perlu sinergitas dan keterpaduan dari seluruh elemen masyarakat maupun stakeholder. Terlebih dalam menghadapi Tahun Demokrasi harus di terapkan upaya-upaya dalam mengantisipasi potensi kerawanan ATHG seperti maraknya Money Politik dan Politik Identitas di masyarakat.
2. Dalam masalah penanganan konflik, masalah deteksi dini terkait ada aliran keagamaan yang akan menghasilkan bom waktu seperti Yayasan Al Zaitun, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan sebagainya maka perlu dilakukan Sinkronisasi program dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat se-Kalimantan Barat sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dan langkah yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

### B. SARAN

1. Masyarakat harus dapat memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan praktik politik uang lainnya.
2. Perlu dilakukan efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

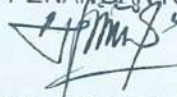


3. Mengantisipasi kemungkinan penggunaan politik identitas/SARA selama tahapan Pemilu 2024 maka perlu dilakukan berbagai macam upaya seperti memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat maupun melakukan Perlibatan tokoh agama sebelum tahapan kampanye yang bertujuan membentengi umat.

Demikian laporan Kegiatan *Focus Group Discussion* Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat ini dibuat sebagai bahan masukan selanjutnya.

Pontianak, Juli 2023

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL  
DAN PENANGAN KONFLIK



HERI SYAFARUDDIN, SE., ME

Pembina Tingkat I

NIP. 19670529 198902 1 002

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi

Keputusan Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala Badan Kesbangpol

Sambutan Pejabat Pembuka

Laporan Penyelenggara

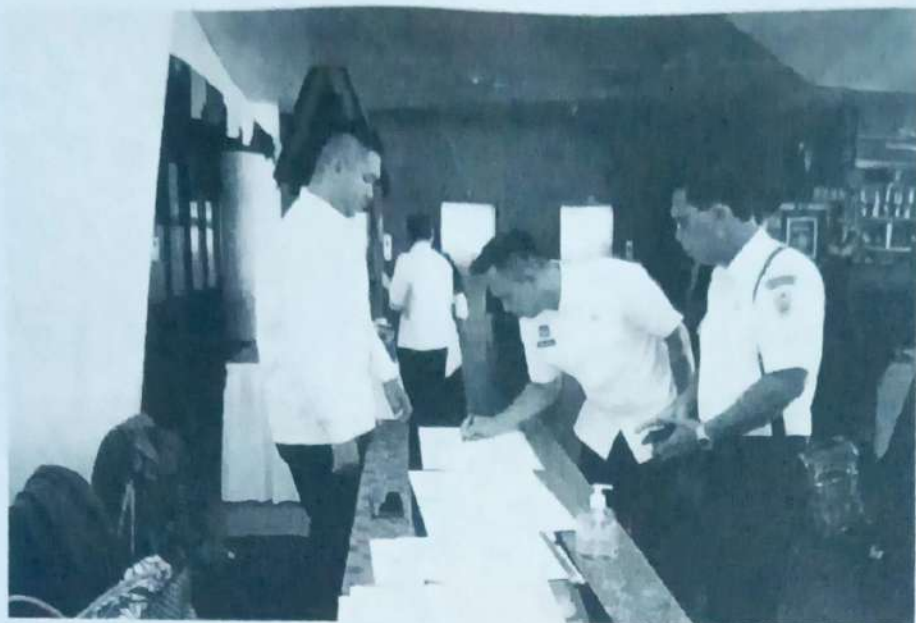
Materi Narasumber

Undangan Kegiatan

Daftar Hadir

U  
A  
P  
P  
A  
M

DOKUMENTASI  
KEGIATAN



**Registrasi peserta kegiatan**



**Kegiatan dipandu oleh pembawa acara**



Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik (Heri Syafaruddin,SE.,ME)



Pembacaan Sambutan dan Pembukaan Kegiatan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Drs.Manto.,M.Si)



Pembacaan Do'a yang dipimpin oleh Sdr.Wirnal Abdy,A.Md



Peserta Kegiatan yang dihadiri dari anggota FKDM Prov.Kalbar, Ketua FKDM Kab/Kota se-Kalimantan Barat, Badan Kesbangpol Kab/Kota se-Kalimantan Barat dan Pejabat Struktural Badan Kesbangpol Prov.Kalbar



Pemandu Acara pada sesi penyampaian Materi dari Narasumber dipandu oleh Moderator (Heri Syafaruddin,SE.,ME)



Penyampaian materi dari Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Prof.Dr.Chairil Efendy,MS)



Penyampaian materi dari Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sanggau (AKBP Purn. Marsianus Ajau)



Penyampaian materi dari Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Melawi (H.Yeskil Lekban, S.Pd.,M.Si)





**Sesi tanya jawab perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat**



**Sesi tanya jawab dari perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat**



**Penutupan acara oleh pembawa acara**



**Foto Bersama dengan Narasumber, Undangan dan Peserta Kegiatan**

LA AMPRAN

ADMINISTRASI

KEGIATAN



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 313 /KESBANGPOL/2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 1707/KESBANGPOL/2021 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERIODE 2021 - 2024

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, telah dibentuk forum kewaspadaan dini masyarakat Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1707/KESBANGPOL/2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Periode 2021 - 2024;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan forum dan penyesuaian nomenklatur jabatan pokok, maka Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1707/KESBANGPOL/2021, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1707/KESBANGPOL/2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Periode 2021 - 2024, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5).
8. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 141).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kerja Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 220/11/KESBANGPOL tanggal 7 Februari 2023

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1707/KESBANGPOL/2021 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Periode 2021 - 2024, dengan susunan keanggotaan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 10 FEBRUARI 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta :  
up. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Panglima Daerah Militer XII/TPR di Pontianak;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

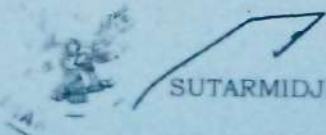
NOMOR : 312 /KESBANGPOL/2023

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 1707/KESBANGPOL/2021 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2021 - 2024

## SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Chairil Effendy, M.S	Tokoh Masyarakat/Adat Melayu Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
2.	Ir. Jakius Sinyor	Tokoh Masyarakat Dayak Provinsi Kalimantan Barat	Wakil Ketua
3.	Viza Juliansyah, S.Sos., M.A., M.I.R	Tokoh Pemuda/Tenaga Pendidik Universitas Tanjungpura	Sekretaris
4.	H.Akhmad Kholil, S.H., M.H	Tokoh Masyarakat Madura Provinsi Kalimantan Barat	Bendahara
5.	Edi Suhairul, S.Pd.I	Tokoh Masyarakat Jawa Kalimantan Barat	Anggota
6.	Prof. Dr. William Chang O.FM.Cap	Tokoh Agama Katolik Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag	Tokoh Agama Islam Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Ir. Putu Dupa Bandem, M.M.A	Tokoh Agama Hindu Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Paulus Andy Mursalim, SE., MM	Tokoh Masyarakat/Adat Tionghoa Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


 SUTARMIDJI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani-Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Telp (0561)736351 Fax. (0561)767242 Email :

kesbangpol@kalbarprov.go.id

Website : <http://kesbangpol.kalbarprov.go.id>

Pontianak

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 25 /KESBANGPOL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini yang dilakukan oleh masyarakat;

b. bahwa untuk memfasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 141).
9. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 27);
10. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Penanggung jawab :
  - a. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Memberikan saran atau masukan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menetapkan persetujuan atas Rencana dan Jadwal Kegiatan;
2. Ketua :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - b. Melakukan evaluasi dan meminta laporan pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pelaksana;
3. Sekretaris :
  - a. Menginventarisir urusan pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - b. Mendukung kelancaran tugas-tugas administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. Menyusun laporan data Pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
4. Anggota :
  - a. Menghimpun atau menginventarisir bahan pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - b. Mendukung kelancaran tugas-tugas administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. Mengadministrasikan surat menyurat berkenaan dengan pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - d. Menyusun bahan-bahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Pontianak  
pada tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HERMANUS

Tembusan :  
Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 29 /KESBANGPOL/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEHATAN FORUM  
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023.

## SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Devi Mulianti,SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4.	Ahmadi, Pengelola Keuangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Muhammad Hidayat, Pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Muhammad Husin, Pengelola Data Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Dwitho Hastaro, S.ST, Tenaga Kontrak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Sri Wahyuni, Tenaga Kontrak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Wahyu Sukma Agung, Tenaga Kontrak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
HERMANUS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242

Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 186 / KESBANGPOL-E / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);

9. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 141);
10. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas menyampaikan paparan/bahan materi sesuai dengan sesi yang dialokasikan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Agustus 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MANTO

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

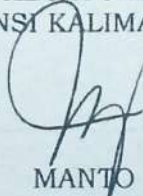
NOMOR : 186 / KESBANGPOL-E / 2023

TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI  
PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN NARASUMBER

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Prof. Dr. Chairil Effendy, MS)	Narasumber
2.	Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Ir.Jakius Sinyor)	Narasumber
3.	Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Viza Juliansyah, S.Sos., M.A., M.I.R)	Narasumber
4.	Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Edi Suhairul, S.Pd.I)	Narasumber

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MANTO





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242

Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 156 / KESBANGPOL-E / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENDUKUNG ACARA KEGIATAN  
FOCUS GROUP DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, perlu dibentuk Pendukung Acara Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pendukung Acara Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);

9. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 141);
10. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Pendukung Acara Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pendukung Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Narasumber bertugas menyampaikan paparan/bahan materi sesuai dengan sesi yang dialokasikan;
- b. Moderator bertugas memperkenalkan narasumber dan memandu acara mulai dari sesi pemaparan materi hingga sesi tanya jawab/diskusi;
- c. Pembawa Acara bertugas memandu dan membacakan acara pada saat acara pembukaan dan penutupan kegiatan;
- d. Dirigen bertugas memandu peserta dan undangan untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada saat pembukaan acara kegiatan;
- e. Pembaca Do'a bertugas memandu pembacaan do'a pada saat acara pembukaan
- f. Notulis bertugas mencatat substansi dari materi pelatihan dan proses tanya jawab/diskusi;

KETIGA




: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Juli 2022.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
MANTO

PARAF HIRARKI

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Kabid KNPk	
Analisis Kebijakan	

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 156 / KESBANGPOL-E / 2023

TENTANG PENUNJUKAN PENDUKUNG ACARA KEGIATAN FOCUS GROUP  
DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

## SUSUNAN KEANGGOTAAN PENDUKUNG ACARA

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat	Narasumber
2.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Prof. Dr. Chairil Effendy, MS)	Narasumber
3.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Melawi (H.Yeshil Leban, S.Pd., M.Si)	Narasumber
4.	Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sanggau (AKBP Purn. Marsianus Ajau)	Narasumber
5.	Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Ir.Jakius Sinyor)	Moderator
6.	Verifikator Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Rika Kartika Sari, A.Md.,Ak)	Pembawa Acara
7.	Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Yovita Ervina, S.Sos)	Dirigen
8.	Pengelola Barang Milik Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Wirnal Abdy,A.Md)	Pembaca Do'a

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
8.	Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat (Tri Haryani, SE)	Notulis

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MANTO

PARAF HIRARKI

Sekretaris	H
Kabid KNPK	H
Analisis Kebijakan	d



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242

Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

## BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023

NAMA LENGKAP (GELAR) : Drs.MANTO.,M.Si

TEMPAT TANGGAL LAHIR : -

JABATAN KEPENGURUSAN DALAM : KEPALA BADAN KESBANGPOL  
PROV.KALBAR

ALAMAT KANTOR : KOMPLEK KANTOR GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT, JLAHMAD YANI,  
PONTIANAK

ALAMAT RUMAH : -

NOMOR TELPON ( HP ) : -

ALAMAT EMAIL : -

NOMOR NPWP : -

NOMOR REKENING : 1025602249

NAMA BANK : BANK KALBAR

Pontianak, 12 Juli 2023

Drs.MANTO.,M.Si

- Biodata peserta harap diisi dan diserahkan paling lambat sebelum kegiatan dimulai pada tanggal 11 Juli 2023 melalui narahubung Devi Mulianti,SE (0812-5709-615)



# **PERAN FKDM SEBAGAI INTELIJEN DI DAERAH**



**Drs. MANTO, M.Si**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**LATAR BELAKANG**

Lahirnya Uu No 17 Th 2011 Ttg Intelijen Negara Serta Perpres No 67 Th 2013 Ttg Koord Intelijen Negara Dan Perkabin No 01 Th 2014 "Seluruh Kegiatan Intelijen Dikoordinasikan Oleh Bin/Binda"

**Dalam Kaitannya Dgn Pengaturan Permendagri No 11 Th 2006, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Yg Semula Di Bawah Koordinasi Pemda Berubah Menjadi Komite Intelijen Daerah Dengan Binda Sebagai Koordinator**

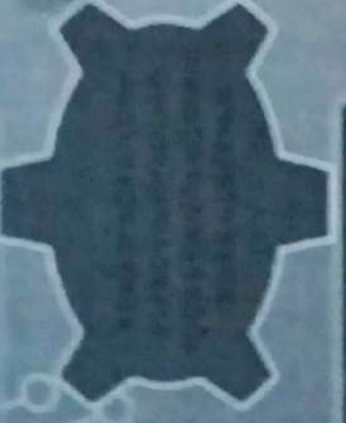
Selanjutnya Hal Tsb Berdampak Perubahan Paradigma Dimana Semula Pemda Melalui Kesbangpol Sbg Pengguna/Penerima Info Dari Sat Intel Terkait Kondisi Di Daerah, Sekarang Menjadi Pemasok Info Intel Terkait Sikon Daerah. Untuk Mendukung Posisi Kesbangpol Sbg Anggota Kominda Dalam Memberikan Info Terkait Kondisi Daerah Maka Diperlukan Membentuk Tim/Satuan Tugas Internal Pemda.

PERMENDAGRI 11 TAHUN 2006 JO PERMENDAGRI 16 TAHUN 2011 TENTANG KOMINDA  
PERMENDAGRI 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH

DISIMPLIFIKASI

PERMENDAGRI NO.02 TAHUN 2018 DAN PERMENDAGRI 46 TAHUN 2019  
TTG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

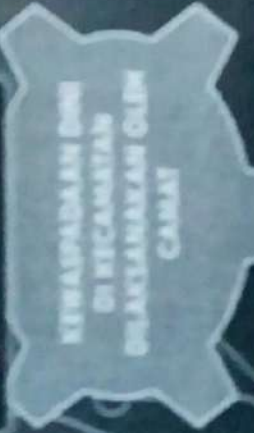
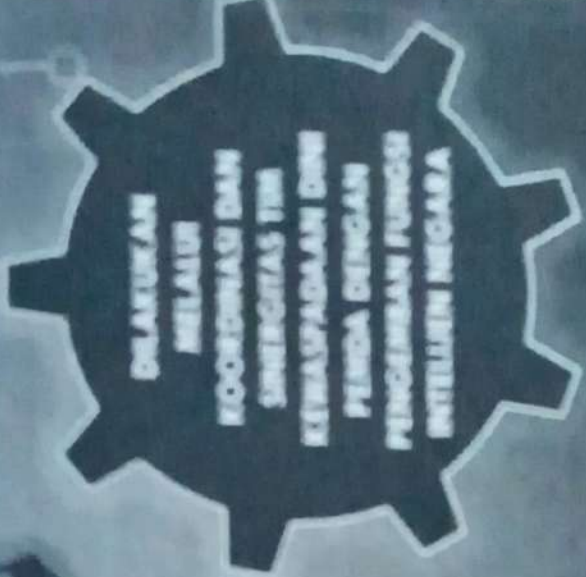
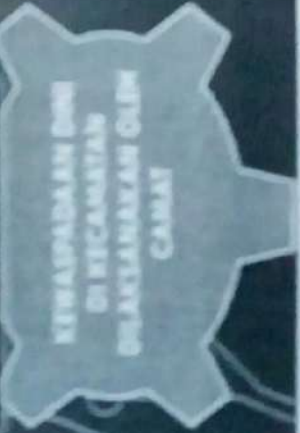
**PROVINSI**



**KAB./KOTA**



**KECAMATAN**



KEWASPADAAN DINI DI KECAMATAN DIJALANKAN OLEH CAMAT

TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH KECAMATAN

PEM KECAMATAN

## **PENGERTIAN**

**Kewaspadaan Dini :**  
**Serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.**

**Pendeteksian dan Pencegahan Dini** adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

# POTENSI ATHG DI KALIMANTAN

## POTENSI ATHG YANG PERLU DIANTISIPASI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL  
BUDAYA

PERSETERUAN ANTARUMAT BERAGAMA DAN/ATAU INTERUMAT BERAGAMA,  
ANTARSUKU, DAN ANTARETNIS.


SENGKETA BATAS WILAYAH DESA, KABUPATEN/KOTA, DAN/ATAU PROVINSI.

SENGKETA SUMBER DAYA ALAM ANTAR MASYARAKAT DAN/ATAU ANTAR  
MASYARAKAT DENGAN PELAKU USAHA

DISTRIBUSI SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK SEIMBANG DALAM MASYARAKAT

## (FKDM)



- FKDM DIBENTUK DI PROV, KAB/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA.
  - PEMBENTUKAN FKDM DILAKUKAN OLEH MASY & DITETAPKAN OLEH PEMDA
  - FKDM MEMILIKI HUB YG BERSIFAT KONSULTATIF DAN MERUPAKAN AKSES INFORMASI BAGI TIM KEWASPADAAN DINI PEMDA
  - FKDM SEBAGAI AKSES INFORMASI BERKOORDINASI DAN MEMBERIKAN INFO KEPADA TIM KEWASPADAAN DINI PEMDA
- 

Keanggotaan FKDM Prov, FKDM Kab/Kota, dan FKDM Kec, FKDM Kel/Desa sesuai dengan kebutuhan terdiri dari :  
wakil ormas, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, atau elemen masy lainnya

# MASYARAKAT (FKDM)

## PROVINSI

### FKDM PROVINSI

KETUA, WAKIL KETUA,  
SEKRETARIS DAN  
ANGGOTA.

1. menjangir, menampung, mengoordinasikan, & mengkomunikasikan data/ informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kpd TKDD Prov

## KABUPATEN/KOTA

### FKDM KAB/KOTA

KETUA, WAKIL KETUA,  
SEKRETARIS DAN  
ANGGOTA.

1. menjangir, menampung, mengoordinasikan, & mengkomunikasikan data/ informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kpd TKDD Kab/Kota

## KECAMATAN

### FKDM KECAMATAN

KETUA, WAKIL KETUA,  
SEKRETARIS DAN  
ANGGOTA.

1. menjangir, menampung, mengoordinasikan, & mengkomunikasikan data/ informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kpd TKDD Kecamatan

## KELURAHAN

### FKDM KELURAHAN

KETUA, WAKIL KETUA,  
SEKRETARIS DAN  
ANGGOTA.

1. menjangir, menampung, mengoordinasikan, & mengkomunikasikan data/ informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kpd TKDD Kelurahan

# MASYARAKAT (FKDM)

Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.

Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur, bupati/walikota, camat atau lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat antara lain :

Sebagai ujung tombak dalam pengumpulan informasi terkait dengan potensi ancaman di daerahnya.

Sebagai mata dan telinga serta membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Membantu pencegahan awal terhadap ancaman di daerahnya.

Sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

Temu Cepat dan Laporan Cepat.

Fungsi deteksi dini : koordinasi dengan forum2 dan jajaran komunitas intelijen secara optimal, karena hal tsb merupakan fungsi yang sangat sentral dalam upaya pencegahan dini terhadap gangguan-gangguan dalam masyarakat.

Perspektif intelijen : penyelidikan yang menggunakan metoda deteksi dini (temu cepat) dan prinsip "velox at exatus" (cepat dan akurat) dalam pelaporan (lapor cepat), maka intelijen dapat terhindar dari pendudukan. Demikian halnya dengan FKDM, jika prinsip "temu cepat" dan "lapor cepat" menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi FKDM, maka peran FKDM menjadi sangat elementer dalam memelihara datangnya keamanan.



Fungsi kewaspadaan dini : kemampuan mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan cepat.

Cth :

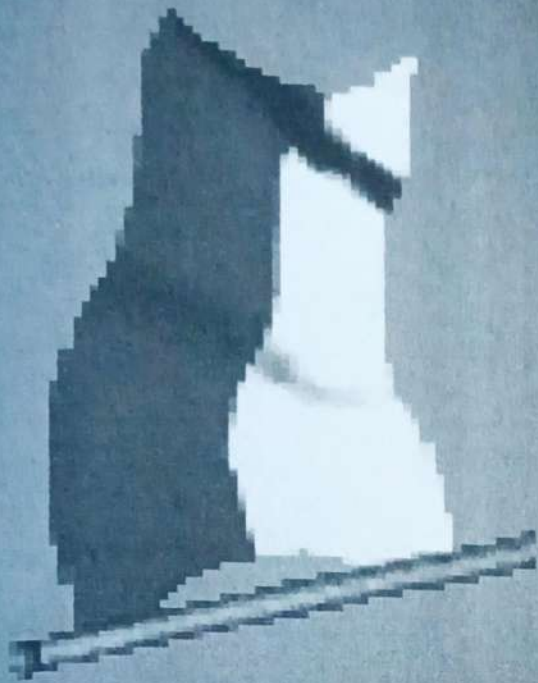
1. Di bidang ideologi, fokus pada penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
2. Di bidang politik, melakukan pemetaan kekuatan politik dan elemen yg berpengaruh terhadap dinamika politik, serta penentuan peran masyarakat sipil (civil society).
3. Di bidang ekonomi, mencermati fluktuasi kenaikan harga sembilan bahan pokok,
4. Di bidang sosial dapat dilakukan dengan pemetaan daerah rawan pangan, rawan penyakit, rawan bencana alam, rawan penduduk, rawan kriminal dan lain-lain,
5. Di bidang pertahanan keamanan dapat dilakukan dengan pemetaan daerah basis kriminal, membuat sistem ketahanan lingkungan dan lain-lain

# DINI MASYARAKAT PROV/KAB/KOTA SE KALBAR

## REKAP SK FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	SK FKDM
1	Provinsi Kalbar	2021-2024
2	Pontianak	2020-2024
3	Mempawah	2015-2021
4	Singkawang	2011-2018
5	Sambas	-
6	Landak	2022-2025
7	Bengkayang	2022-2025
8	Sanggau	2021-2025
9	Sekadau	2017-2022
10	Sintang	2019-2023
11	Melawi	2022-2024
12	Kapuas Hulu	2013-2022
13	Kubu Raya	-
14	Kayong Utara	2018-2020
15	Ketapang	2018-2023

# SEKIAN DAN TERIMA KASIH





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242

Laman [www.kebangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kebangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kebangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kebangpol@kalbarprov.go.id)

## BIODATA NARASUMBER

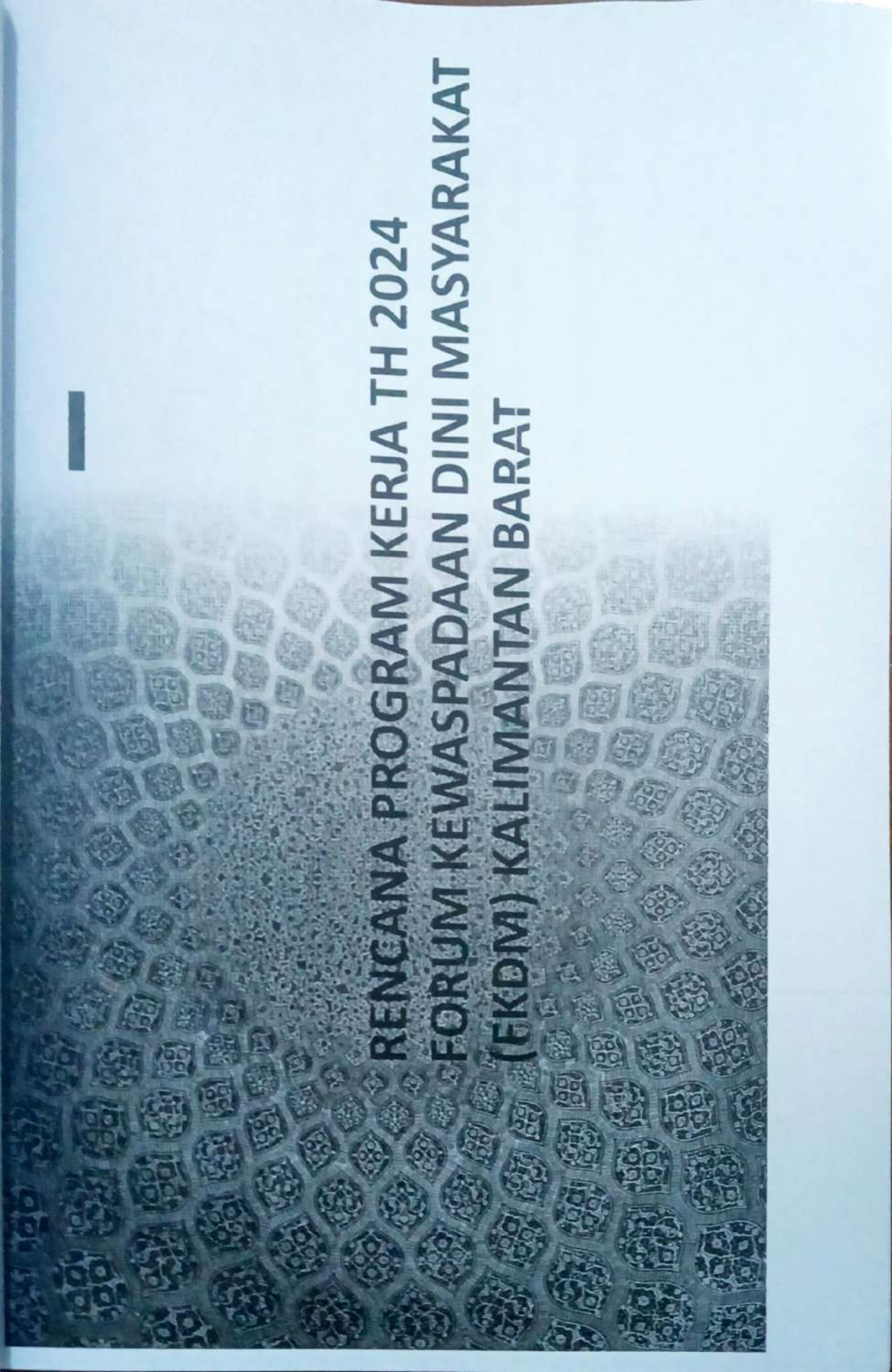
KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023

NAMA LENGKAP (GELAR)	:	Prof.Dr.CHAIRIL EFFENDY,MS
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	SINGKAWANG, 9 MEI 1957
JABATAN KEPENGURUSAN	DALAM	KETUA FKDM PROV KALBAR
ALAMAT KANTOR	:	JL.Prof.Dr.H.Hadari Nawawi
ALAMAT RUMAH	:	Jl.Tanjungsari No.204
NOMOR TELPON ( HP )	:	0811-5706-50
ALAMAT EMAIL	:	chairil.effendi1957@gmail.com
NOMOR NPWP	:	05.371.975.3-701.000
NOMOR REKENING	:	1112504555
NAMA BANK	:	BANK KALBAR

Pontianak, 12 Juli 2023

Prof.Dr.CHAIRIL EFFENDY,MS

- Biodata peserta harap diisi dan diserahkan paling lambat sebelum kegiatan dimulai pada tanggal 11 Juli 2023 melalui narahubung Devi Mulianti,SE (0812-5709-615)



---

**RENCANA PROGRAM KERJA TH 2024  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
(EKDM) KALIMANTAN BARAT**

## Latar Belakang

- Kalbar merupakan provinsi dengan kondisi kerawanan bencana yang unik dibandingkan banyak daerah lain.
- Provinsi ini memiliki kerawanan bencana selain yang berasal dari alam, tapi juga kerawanan bencana sosial.
- Pemilu serentak tahun 2024 meningkatkan potensi kerawanan konflik sosial.

Untuk itu, FKDM Kalbar menyiapkan sejumlah program utk. mengantisipasinya.

## Tujuan

1. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi bencana alam
2. Meningkatkan penanganan konflik sosial di Provinsi Kalbar.
3. Memperkuat kerjasama antar kelompok etnis atau agama untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan saling pengertian.
4. Meningkatkan partisipasi masy. dalam penanganan konflik sosial antaretnis/agama.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap FKDM sebagai lembaga yang peduli dan aktif menjaga perdamaian dan kerukunan sosial di Provinsi Kalbar.

## Program Kerja

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat
- Pembuatan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini
- Penguatan Kerjasama Antar Lembaga
- Pemantauan dan Evaluasi
- Penanganan Konflik Sosial



# Peningkatan Kesadaran Masyarakat

- Mengadakan sosialisasi dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan dini dalam menghadapi bencana alam dan sosial.
- Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai tindakan-tindakan kewaspadaan dini dalam menghadapi bencana alam.
- Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai penanganan konflik sosial.

## Pembuatan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini

- Identifikasi kebutuhan dan sumber informasi
- Perancangan dan pengembangan sistem
- Uji coba sistem
- Pelatihan dan sosialisasi
- Evaluasi dan perbaikan

## Penguatan Kerja Sama Antarlembaga

- Membuat forum koordinasi antar lembaga
- Membuat program pelatihan bersama
- Membuat protokol kerjasama
- Meningkatkan sinergi dengan LSM dan lembaga donor
- Membuat sistem monitoring dan evaluasi

## Pemantauan dan Evaluasi

- Menentukan Indikator Keberhasilan
- Pelaksanaan Monitoring
- Evaluasi Berkala
- Perbaikan atau Perubahan Program

## Penanganan Konflik Sosial

- Pelatihan dan Workshop bagi anggota FKDM
  - Menyusun modul pelatihan
  - Mengadakan workshop
- Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial
  - Menyusun panduan operasional untuk tim penanganan konflik sosial
  - Melakukan pelatihan dan simulasi terhadap anggota tim penanganan konflik sosial
- Penyediaan Sarana dan Prasarana
  - Membangun pusat informasi dan advokasi bagi korban konflik
  - Menyediakan posko penanganan konflik sosial yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

I

Terima Kasih



# PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242  
Laman www.kesbangpol.kalbarprov.go.id Pos-el kesbangpol@kalbarprov.go.id

## BIODATA NARASUMBER

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023

NAMA LENGKAP (GELAR)	:	H. YESKIL LEBAN, S.Pd.,M.Si
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	TANJUNG LUAR, 27 DESEMBER 1963
JABATAN KEPENGURUSAN	DALAM	KETUA FKDM KABUPATEN MELAWI
ALAMAT KANTOR	:	JL. JUANG, NANGA PINOH
ALAMAT RUMAH	:	JL. AKASIA, NO.10, DESA PAAL
NOMOR TELPON ( HP )	:	0812-5845-5855
ALAMAT EMAIL	:	-
NOMOR NPWP	:	16.089.720.3-706.000
NOMOR REKENING	:	4521997651
NAMA BANK	:	BANK KALBAR

Pontianak, 12 Juli 2023

H. YESKIL LEBAN, S.Pd.,M.Si

- Biodata peserta harap diisi dan diserahkan paling lambat sebelum kegiatan dimulai pada tanggal 11 Juli 2023 melalui narahubung Devi Mulianti,SE (0812-5709-615)

FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT KABUPATEN  
MELAWI



KEPUTUSAN BUPATI MELAWI

NOMOR 220/139 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN SUSUNAN  
PENGURUS DAN TIM SEKRETARIAT FKDM KABUPATEN

MELAWI 2022 - 2024

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEWASPADAAN DINI  
DI  
DAERAH





Berakhlax  
Berita Beras Statistik

Disiak  
Tulis artikel tentang Berakhlax dan dapatkan juga dapat akses media sosial

Berakhlax  
Berita Beras Statistik

Energi Harga Eceran Harga Produsen

Hortikultura Kehutanan Perikanan

Selengkapnya...

Selengkapnya...

Galeri Infografis

TABEL DINAMIS

Kamus Pembakuan Statistik

Cara Mendapatkan Data BPS

PNBP • Not Rugi • Gratis

Unduh

Aa Istilah Statistik

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jawa)	
	2020	2021
Tanah Pinoh Barat	14.867,00	15.084,00
Tanah Pinoh	18.657,00	18.951,00
Sokan	18.710,00	18.933,00
Siyon	19.311,00	19.492,00
Pinoh Utara	15.220,00	15.480,00
Pinoh Selatan	12.028,00	12.115,00
Nanga Pinoh	54.424,00	55.020,00
Menukung	20.991,00	21.249,00
Kab. Melawi	239.370,00	251.242,00
Elia Hilir	18.548,00	18.028,00
Belimbing Hulu	10.818,00	10.900,00
Belimbing	24.286,00	24.540,00

Showing 1 to 12 of 12 entries  
Showing 1 to 12 of 12 entries

DATA SERIES: 2020-2022





Badan Pusat Statistik Kabupaten  
Melawi (bps.go.id)

Buka di

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN  
MELAWI

MARI KITA JADIKAN PEMILU 2024 PESTA RAKYAT YANG  
MENYENANGKAN :

- TANPA HOAX
- TANPA IRI, DENGKI
- TANPA CACI MAKI
- TANPA SARA DAN RASISME

INGAT !!

KITA SEMUA BERSAUDARA  
KITA SEMUA PANCASILA  
DALAM BINGKAI NKRI

SEKIAN TERIMA KASIH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242  
Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

**BIODATA NARASUMBER**

KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2023

NAMA LENGKAP (GELAR) : AKBP Purn. MARSIANUS AJAU  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : SANGGAU, 2 MARET 1960  
DALAM : WAKIL KETUA FKDM KABUPATEN SANGGAU  
KABUPATEN : SANGGAU  
ALAMAT KANTOR : SABANG MERAH, SANGGAU  
ALAMAT RUMAH : 0813-4557-7680  
NOMOR TELPON ( HP ) : -  
ALAMAT EMAIL : 58.820.140.0-701.000  
NOMOR NPWP : 347501000920501  
NOMOR REKENING : BRI  
NAMA BANK

Pontianak, 12 Juli 2023

AKBP Purn. MARSIANUS AJAU

\* Biodata peserta harap diisi dan diserahkan paling lambat sebelum kegiatan dimulai pada tanggal 11 Juli 2023 melalui narahubung Devi Mulianti, SE (0812-5709-615)

FKDM KABUPATEN

SANGGAU

WILAYAH : 15 kecamatan

Sudah di bentuk : 4 Kecamatan

Akan dibentuk tahun 2023 : 6 kec.

Bantuan hibah dari pemda sanggau 2023 : Rp. 50 jt ( dalam proses pencairan)



# Program Kerja

## Poin 1

Menyerap informasi dari berbagai lapisan masyarakat (Pertemuan pertemuan dengan lapisan masyarakat, coffee morning, rapat pengurus bulanan, Fokus Grup Discussion).

## Poin 2

Koordinasi dengan FKDM provinsi Kalbar

# Program Kerja

## Poin 3

Mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah daerah yang bersifat koordinasi dan lainnya, termasuk undangan undangan FGD seperti sekarang ini Yang di selenggarakan FKDM kalbar.

## Poin 4

Rencana kerjasama Pelatihan dengan BIN Sanggau dalam upaya untuk melatih memilah dan mengolah data dan informasi, sehingga menjadi informasi yang valid (A1).

# Program Kerja



Koordinasi dengan Forkopimda.

# Permasalahan di Kabupaten Sanggau

## Poin 1

Perlintasan jalur Narkoba (masuk melewati border Indonesia Malaysia / entikong). Sehingga menempatkan sanggau sebagai titik rawan peredaran narkoba.

## Poin 2

Masalah perdagangan orang (TKI ILEGAL)

## Poin 3

Perjudian online yang meresahkan (judi slot dll). Bahkan ada usia remaja di kota sanggau yg terliit hutang ratusan juta mengatas namakan orang tuanya hanya untuk membeli chip yang digunakan untuk judi online. FKDM SANGGAU dalam hal ini mendorong pemerintah pusat / menkominfo untuk bisa membalok situs situs judi online tersebut yang bisa merusak bukan saja orang dewasa tapi di kalangan remaja.

# PANTUN

Siang-siang pergi ke kota,  
Jangan lupa beli alpukat.  
Demikian materi dari saya,  
Semoga bisa bermanfaat.





SEKIAN TERIMA

KASIH





**SAMBUTAN**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

Rabu, 12 Juli 2023.

---

Yang saya hormati :

- Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Kalimantan Barat;
- Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- Para Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- Pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Barat;
- Pengurus FKDM Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat;
- Undangan dan hadirin yang berbahagia.

***Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.***

Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul diruangan ini untuk melaksanakan Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023.

***Hadirin dan Undangan yang berbahagia.***

Sebagaimana diketahui untuk mendorong terciptanya Stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG), maka diperlukan adanya peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah melalui pendeteksian dan Pencegahan Dini dari berbagai unsur baik pemerintah maupun lapisan Masyarakat.

Dengan semakin canggihnya teknologi Informasi, terbukanya lalu lintas perdagangan antar pulau, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat dunia yang semakin global, ditandai dengan semakin derasnya arus informasi yang masuk akan membawa pengaruh, baik positif maupun negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Untuk menghadapi pengaruh Globalisasi, diperlukan upaya meningkatkan wawasan pengetahuan serta memperkuat Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif duniawi seperti penyalahgunaan Teknologi Informasi, Penyalahgunaan Narkoba, maupun pergaulan bebas lainnya sebagai akibat dari perkembangan arus Globalisasi, maka menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama untuk terus menanamkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena sosial yang tumbuh secara alami harus disikapi secara arif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini harus disadari bersama bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kita hidup harus saling berdampingan, gotong royong, saling membantu yang mewarnai kehidupan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak jaman dahulu, selain itu berbagai potensi ATHG harus selalu kita waspadai melalui deteksi dini dan dicegah melalui peran Aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat.

Kekhawatiran terhadap gangguan disharmoni kehidupan berbangsa juga dirasakan semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan gejala intoleransi, berbagai kasus yang menunjukkan seakan bangsa ini tak terbiasa dengan perbedaan. Berbagai hal dapat memicu konflik seperti perbedaan dukungan dalam kontestasi politik, hingga perbedaan paham dan doktrin dalam suatu keagamaan.

Untuk menjamin terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi berbagai potensi ATHG, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang menyatakan bahwa untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat, melalui Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk itu saya mengharapkan dengan diselenggarakannya Focus Group Discussion Forum ini agar mampu mengantisipasi serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan,

hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan Pencegahan Dini sehingga tercipta stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat.

Disamping itu Saudara juga harus mampu mewujudkan semangat keterpaduan komponen dan lapisan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) keamanan dalam Negeri khususnya dalam memelihara Ketenteraman dan Ketertiban masyarakat, serta dapat memberikan saran dan masukan serta rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

### ***Hadirin dan Undangan yang berbahagia.***

Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 12 diantaranya sudah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan 2 Kabupaten yang akan memperbaharui kepengurusannya.

Saya berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta dapat memperoleh bahan masukan dalam perumusan kebijakan melalui upaya deteksi dini dan

cegah dini terhadap berbagai bentuk potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah demi terciptanya stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif di Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan mengucap: **"Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka"**.

Sekian dan terima kasih.

**Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.**

**KEPALA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Drs. MANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670221 198603 1 004**



## LAPORAN KETUA PANITIA

PADA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023  
Rabu, 12 Juli 2023

---

Yang saya hormati :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Kalimantan Barat;
- Para Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- Pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Barat;
- Pengurus FKDM Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat;
- Undangan dan hadirin yang berbahagia.



*Assalamualaikum Wr. Wb.*  
*Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul diruangan ini untuk melaksanakan Diskusi mensinkronisasikan Program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023.

Berkenaan dengan Kegiatan tersebut, izinkan saya melaporkan hal-hal sebagai berikut :

**LATAR BELAKANG**

Bahwa guna mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (THA), diperlukan melakukan koordinasi Kewaspadaan

Dini Pemerintah Daerah baik pada Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kab/Kota se- Kalimantan Barat melalui Focus Group Discussion. Hal tersebut perlu dilaksanakan sebagai upaya dalam menyamakan persepsi dan pandangan guna meningkatkan peran dan sinergitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Nomor 121 j.o Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Dalam permendagri tersebut di atas, diamanatkan juga tentang adanya kewajiban bagi Daerah untuk memberdayakan segenap unsur masyarakat, Peran serta unsur masyarakat secara nyata dilaksanakan dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan sinkronisasi Program Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Untuk melakukan diskusi untuk Sinkronisasi program dan Kegiatan FKDM di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat.

## **C. PESERTA**

Peserta kegiatan adalah Ketua Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat.

## **D. NARASUMBER**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ketua FKDM Kabupaten Sanggau;
4. Ketua FKDM Kabupaten Melawi.

## **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Terlaksananya kegiatan Focus Group Discussion Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023 guna mengembangkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

## **F. PENUTUP**

Demikian hal-hal yang dapat disampaikan, selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat untuk membuka secara resmi Kegiatan Focus Group Discussion Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023.

Sekian dan terima kasih,

**Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita  
semua.**

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HERI SYAFARUDDIN', written over a faint, stylized graphic element that resembles a triangle or a stylized letter 'S'.

**HERI SYAFARUDDIN, SE., ME.**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 787242  
Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

Pontianak, 10 Juli 2023

Nomor : 200.1.3.1/ 686 / KESBANGPOL-E  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Undangan

Yth. (Daftar terlampir)

di  
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Forum Grup Discussion (FGD) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, akan dilaksanakan rapat persiapan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/11 Juli 2023  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Jend. Ahmad Yani, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
Acara : Membahas persiapan pelaksanaan kegiatan

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Drs. Manto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670221 198603 1 004


PARAF HIERARKI

Kabid KNPK	sk
Jabatan Fungsional	d
Pelaksana	4

Surat Undangan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor : 200.1.3.1/486 / KESBANGPOL-E  
Tanggal : 10 Juli 2023

Daftar Peserta Rapat

1. Heri Syafarrudin, SE.,ME, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
2. Devi Mulianti, SE, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ahmadi, Pengelola Keuangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
4. Muhammad Hidayat, S.Tr.IP, Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
5. Muhammad Husin, Pengelola Data Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
6. Dwitho Hastaro, S.ST, Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
7. Sri Wahyuni, Tenaga Kontrak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
8. Wahyu Sukma Agung, Tenaga Kontrak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Yovita Ervina, S.Sos, Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
10. Wirna Abdy, A.Md, Pengelola Barang Milik Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
11. Rika Kartika Sari, A.md, Verifikator Badan Keuangan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
12. Tri Haryani, SE, Tenaga Kontrak, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,  


Drs. Manto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/c)  
NIP. 19670221 198603 1 004

PARAF HIERARKI	
NPK	
Fungsional	
na	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78134

Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 757242

Laman www.kesbangpol.kalbarprov.go.id Pos-el kesbangpol@kalbarprov.go.id

Pontianak, 7 Juli 2023

Nomor : 200.1.3.1/ 645 / KESBANGPOL-E  
Kategori : Penting  
Sampiran : Satu Berkas  
Jenis : Undangan

Untuk : Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol  
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat  
(Daftar Terlampir)

Tempat

Sehubungan dengan sinkronisasi Program dan Kegiatan Forum Kewaspadaan  
Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, dengan  
perhatian dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
akan melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum  
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-  
Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan tema "Forum Kewaspadaan Dini  
Masyarakat (FKDM) sebagai Intelijen Masyarakat di Daerah".

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/12 Juli 2023

Pukul : 07.30 Wib – selesai

Tempat : Ruang Smokey Quartz Lantai C Hotel Golden Tulip  
Jl. Teuku Umar Pontianak

Catatan : Dimohon untuk membawa Program Kerja FKDM masing-  
masing Kabupaten/Kota yang akan di paparkan pada saat  
kegiatan (soft copy & hard copy).

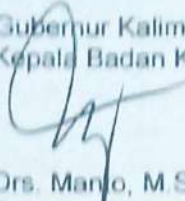
Peserta kegiatan adalah Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol  
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan pengurus Forum Kewaspadaan Dini  
Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat  
sebagaimana terlampir.




4. Perlu .....



4. Perlu kami sampaikan bahwa panitia hanya menyediakan konsumsi selama kegiatan berlangsung, sedangkan akomodasi dan transportasi dalam rangka kegiatan tersebut ditanggung oleh peserta.
  5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Heri Syafaruddin, SE, ME (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik HP 0895-0905-9395)
- Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

  
Drs. Manjo, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670221 198603 1 004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kabid KNPK	
Analisis Kebijakan	

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Lampiran 1

Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Nomor : 200.1.3.1/675 / KESBANGPOL-E

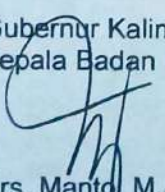
Tanggal : 7 Juli 2023

Daftar Peserta Kegiatan

NO	JABATAN/LEMBAGA	JUMLAH
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	1 orang
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang	1 orang
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kubu Raya	1 orang
4.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah	1 orang
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak	1 orang
6.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas	1 orang
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	1 orang
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau	1 orang
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang	1 orang
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau	1 orang
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Melawi	1 orang
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ketapang	1 orang
13.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kayong Utara	1 orang
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu	1 orang
15.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	7 Orang
16.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak	2 Orang
17.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Singkawang	2 Orang
18.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kubu Raya	2 Orang
19.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Mempawah	2 Orang
20.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Landak	2 Orang
21.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sambas	2 Orang
22.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bengkayang	2 Orang
23.	Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sanggau	2 Orang
24.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang	2 Orang
25.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sekadau	2 Orang
26.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Melawi	2 Orang
27.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Ketapang	2 Orang
28.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kayong Utara	2 Orang
29.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	2 Orang
	Jumlah	49 Orang

a.n. Gubernur Kalimantan Barat  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kabid KNPK	H
Analisis Kebijakan	d

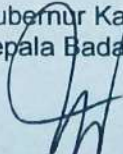
  
Drs. Mantu M. Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670221 198603 1 004

lampiran 2 : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor : 200.1.3.1/ 675 / KESBANGPOL-E  
Tanggal : 7 Juli 2023



Adwal Acara Focus Group Discussion (FGD) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  
(FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Tahun 2023

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 12 Juli 2023		
07.30 – 08.00	Registrasi	Panitia
08.00 – 08.05	Pembukaan	MC
08.05 – 08.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dirigen
08.10 – 08.15	Pembacaan Doa	Pembaca Doa
08.15 – 08.25	Laporan Ketua Panitia	Kepala Bidang KNPK Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat
08.25 – 09.25	Sambutan dan Arahan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalbar Prov. Kalbar sekaligus membuka kegiatan secara resmi	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat
09.25 – 09.35	Coffee break	
09.35 – 10.35	Penyampaian Ekspose Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Barat
10.35 – 12.00	Penyampaian Ekspose Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 14 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat dan dilanjutkan dengan dialog interaktif.	Ketua FKDM 14 Kab/Kota se-Kalbar dipandu oleh moderator
12.00 – 12.15	Penutup	Panitia

a.n. Gubernur Kalimantan Barat  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

  
Drs. Manto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670221 198603 1 004

PARAF HIERARKI

Sekretaris	
Kabid KNPK	
Analisis Kebijakan	



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242  
Laman www.kesbangpol.kalbarprov.go.id Pos-el kesbangpol@kalbarprov.go.id

Pontianak, 11 Juli 2023

Nomor : 200.1.3.1/(68) / KESBANGPOL-E  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Undangan  
Yth. (Daftar Terlampir)

di  
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/12 Juli 2023  
Pukul : 07.30 Wib – selesai  
Tempat : Ruang Smokey Quartz Lantai C Hotel Golden Tulip  
          Jl. Teuku Umar Pontianak

Demikian atas kesediaan dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Drs. Manto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670221 198603 1 004

## PARAF HIRARKI

Sekretaris	
Kabid KNPk	
Analisis Kebijakan	

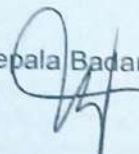
Plh

Lampiran 1 : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat  
Nomor : 200.1.3.1/ 685 / KESBANGPOL-E  
Tanggal : 11 Juli 2023

### Daftar Undangan



1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Drs. Manto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670221 198603 1 004

#### PARAF HIERARKI

Sekretaris	
Kabid KNPK	
Analisis Kebijakan	

Lampiran 2 : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Provinsi Kalimantan Barat  
 Nomor : 200.1.3.1/6.03 / KESBANGPOL-E  
 Tanggal : 11 Juli 2023

Jadwal Acara Focus Group Discussion (FGD) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  
 (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Tahun 2023

Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 12 Juli 2023		
07.30 – 08.00	Registrasi	
08.00 – 08.05	Pembukaan	Panitia
08.05 – 08.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC
08.10 – 08.15	Pembacaan Doa	Dirigen
08.15 – 08.25	Laporan Ketua Panitia	Pembaca Doa
08.25 – 09.25	Sambutan dan Arahan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalbar Prov. Kalbar sekaligus membuka kegiatan secara resmi	Kepala Bidang KNPK Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat
09.25 – 09.35	Coffee break	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat
09.35 – 10.35	Penyampaian Ekspose Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat	Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Barat
10.35 – 12.00	Penyampaian Ekspose Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 14 Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat dan dilanjutkan dengan dialog interaktif.	Ketua FKDM 14 Kab/Kota se-Kalbar dipandu oleh moderator
12.00 – 12.15	Penutup	Panitia

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kabid KNPK	<i>[Signature]</i>
Analisis Kebijakan	<i>[Signature]</i>

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

*[Signature]*

Drs. Marjito, M.Si  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19670221 198603 1 004

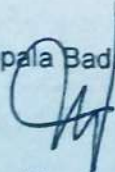
## DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Selasa  
 Tanggal : 11 Juli 2023  
 Waktu : 09.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat  
 Acara : Rapat Persiapan Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023



NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	HEM.S.	KABID KEMPK	(L/P)	1.
2.	Devi Mulianti	Analisis Kebijakan	(L/P)	2.
3.	JAKIUS	FKDM	(L/P)	3.
4.	Vita J	FKDN	(L/P)	4.
5.	Rifki Hoesan	Verifikator	(L/P)	5.
6.	Tri Haryani	staff	(L/P)	6.
7.	Dwifho	Staff	(L/P)	7.
8.	Melhi Hidayat	Staff	(L/P)	8.

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
9.	M. Ludi	staf	(L/P)	9. ....
10.	AHMADI	Kesbangpol Prov.	(L/P)	10. ....
11.	YUNTA ERUINA	---	(L/P)	11. ....
12.	MIRNA ASPI	---	(L/P)	12. ....
13.	SRI WAHYUNI	Staf	(L/P)	13. ....
14.	W. KUMA A.	Staf Kesbangpol	(L/P)	14. ....
15.	RIZKI	STAF	(L/P)	15. ....
16.	FAJAR	STAF	(L/P)	16. ....
17.	RAMA	STAF	(L/P)	17. ....
18.	Sri Suhaimi	FLEDM	(L/P)	18. ....
19.	Ahmad H	PKOR	(L/P)	19. ....
20.	Menik W.N	Andis Kebijakan	(L/P)	20. ....

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Drs. Manto, M.Si  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19670221 198603 1 004

PARAF HIERARKI	
Kabid KNPB	
Analisis Kebijakan	





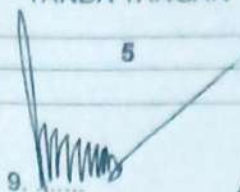

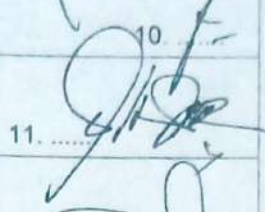
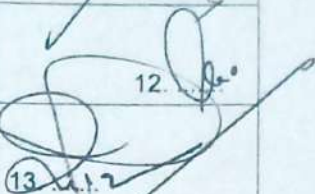
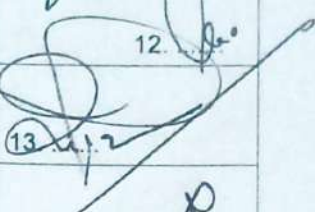
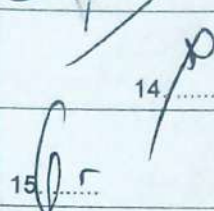
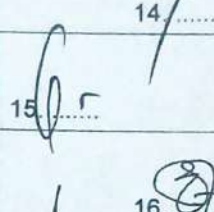
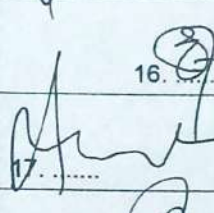
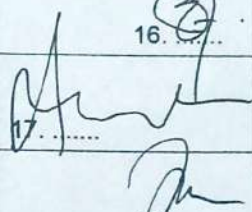
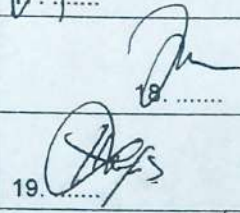
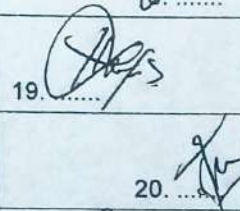
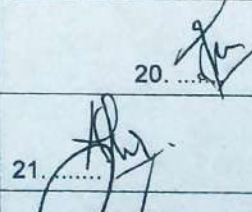
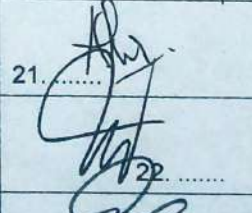
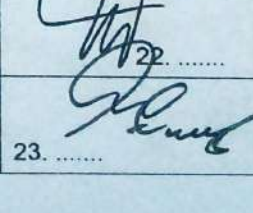
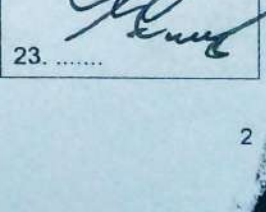
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**


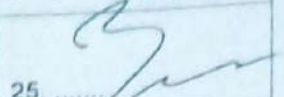
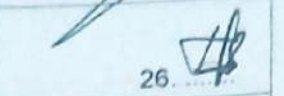
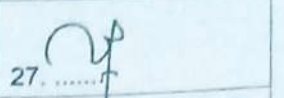
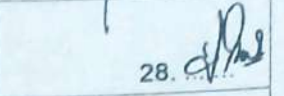
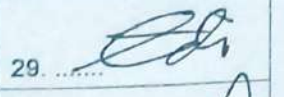
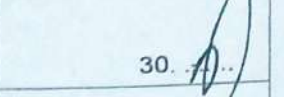
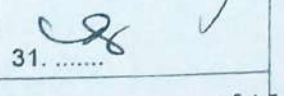
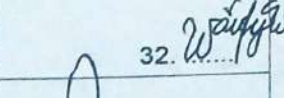
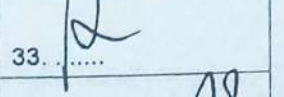
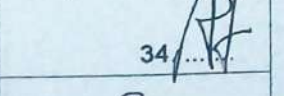
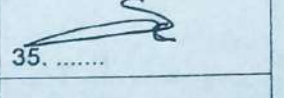
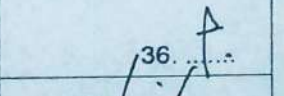
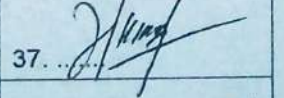
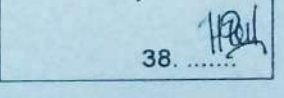
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242  
Laman www.kesbangpol.kalbarprov.go.id Pos-el kesbangpol@kalbarprov.go.id

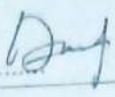
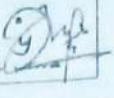
DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juli 2023  
Waktu : 07.30 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Smokey Quartz Lantai C Hotel Golden Tulip,  
Jl. Teuku Umar Pontianak  
Acara : Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  
Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023

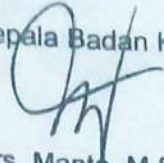
NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	M. Ajeu	Wakil Ketua	(L/P)	1. ....
2.	Jokims	Wakil Ketua Prov	(L/P)	2. ....
3.	Mangni	Ket. Bahid Galang	(L/P)	3. ....
4.	H. Syarifuddin	Sek. FKAM PTK	(L/P)	4. ....
5.	H. M. Syahid	Ketid Wasmas KBR	(L/P)	5. ....
6.	Albertus E	Ketid Wasmas Landel	(L/P)	6. ....
7.	Hursita, Sp.	Kesbangpol Sarbas	(L/P)	7. ....
8.	Silvanus Suryanto	Plh. Kaban Kesbangpol Kab Landel	(L/R)	8. ....

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
9.	SUHARTO	Ketua FKDM	(L/P)	9. 
10.	B. SUKRIEM	Kasubid Kespol	(L/P)	10. 
11.	SAPARUDIN	KABID	(L/P)	11. 
12.	Kaluarin	Kabid PR	(D/P)	12. 
13.	Masyuliandi	Kaban Kesbangpol	(L/P)	13. 
14.	Autocals	Kaban Kesbangpol	(D/P)	14. 
15.	B. Vihes. p	Kabid Kespol	(D/P)	15. 
16.	Merik WB	Dewangkasa	(L/P)	16. 
17.	Sipras Jon	Kaban	(D/P)	17. 
18.	Jakobus	Kaban	(L/P)	18. 
19.	Stefanus Andy.	Kabid	(D/P)	19. 
20.	Tony	FKDM	(D/P)	20. 
21.	Cefiann Arifa.	Kesbangpol Audit Mura	(D/P)	21. 
22.	Drs. Manto. M. Si	Kaban Kesbangpol Prov. Kalbar	(D/P)	22. 
23.	Prof. Dr. Chairil Efendy.	Ketua FKDM Prov. Kalbar	(D/P)	23. 



NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
24	H. Yeshil L.	Ketua FKDM Kab. Melawi	(L/P)	 24. ....
25	Vita Juliangah	Sekretaris FKDM Prov. Kalbar	(L/P)	 25. ....
26	Henri Syapamudin	Kabid KMPK Badan Kesbangpol	(L/P)	 26. ....
27	TOVITA ERVINA	Kesbangpol	(L/P)	 27. ....
28	Deri Mullanti	Analis Kebijakan Badan Kesbangpol	(L/P)	 28. ....
29	Edi	FKDM Kalbar	(L/P)	 29. ....
30	M. Husin	KESKAM POL MAR	(L/P)	 30. ....
31	AHMADI	STAB KESBANGPOL	(L/P)	 31. ....
32	W.S. Agung	STAB KESBANGPOL	(L/P)	 32. ....
33	Rika Kartika	Kesbangpol Prov. Kalbar	(L/P)	 33. ....
34	Winda Abdy	u	(L/P)	 34. ....
35	Sablianto	DOK Kab. Sanggau	(L/P)	 35. ....
36	Mulyadi	Kesbangpol Melawi	(L/P)	 36. ....
37	M. Hidayat	Kesbangpol Prov.	(L/P)	 37. ....
38	TRI Haryani	Kesbangpol Prov	(L/P)	 38. ....

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
39	Dwitto Hactaw	Badan Kesbang Prov. Kalbar	(L/P)	39. 
40	Gei Wihyun	Staf Badan Kesbang Prov. Kalbar	(L/P)	40. 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Drs. Mantop, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670221 198603 1 004

PARAF HIERARKI	
Kabid KNPK	
Analisis Kebijakan	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

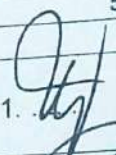
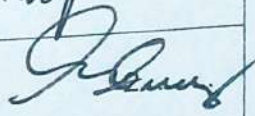
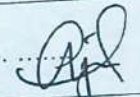
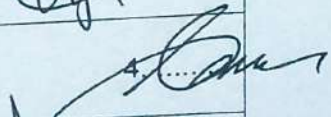
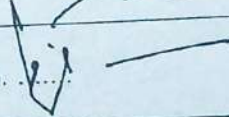
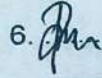
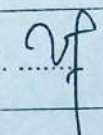
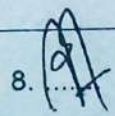
Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124


Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242



Laman www.kesbangpol.kalbarprov.go.id Pos-el kesbangpol@kalbarprov.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu  
 Tanggal : 12 Juli 2023  
 Waktu : 07.30 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Smokey Quartz Lantai C Hotel Golden Tulip,  
 Jl.Teuku Umar Pontianak  
 Acara : Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini  
 Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat  
 Tahun 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs.Manto,M.Si	Narasumber	( L / P )	1. 
2.	Prof.Dr.Chairil Effendy,MS	Narasumber	( L / P )	2. 
3.	AKBP Purn. Marsianus Ajau	Narasumber	( L / P )	3. 
4.	H.Yeshil Lesban, S.Pd.,M.Si	Narasumber	( L / P )	4. 
5.	Ir.Jakius Sinyor	Moderator	( L / P )	5. 
6.	Rika Kartika Sari, A.Md.,Ak	Pembawa Acara	( L / P )	6. 
7.	Yovita Ervina, S.Sos	Dirigen	( L / P )	7. 
8.	Wirnal Abdy,A.Md	Pembaca Do'a	( L / P )	8. 

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JENIS KELAMIN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
9.	Tri Haryani, SE	Notulis	( L / P )	9 

PARAF HIERARKI	
Kebid KNPK	
Analisis Kebijakan	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



Drs. Manto, M.Si  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19670221 198603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242  
Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

NOTULA

- Rapat : Rapat Persiapan Kegiatan Focus Group Discussion  
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan  
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat
- Hari/Tanggal : Selasa/11 Juli 2023
- Surat Undangan : Nomor 200.1.3.1/686/KESBANGPOL-E, Tanggal 10  
Juli 2023
- Waktu Rapat : 10.00 WIB - Selesai
- Acara : Membahas persiapan pelaksanaan kegiatan.
- Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan  
Ketua Penanganan Konflik (Heri Syafaruddin, SE.,ME)
- Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan  
Nasional dan Penanganan Konflik (Devi Mulianti, SE)
- Pencatat : Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Barat (Sri Wahyuni)
- Peserta Rapat : 1. Panitia pelaksana kegiatan Focus Group  
Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  
Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat  
2. Pendukung Acara kegiatan Focus Group  
Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  
Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat
- Kegiatan Rapat : 1. Pembukaan acara oleh Ketua.  
2. Penyampaian maksud dan tujuan kegiatan.  
3. Penyampaian tentang tugas pokok dari panitia  
pelaksana Kegiatan Rapat Persiapan Kegiatan  
Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini  
Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-  
Kalimantan Barat.  
4. Penyampaian tentang tugas pokok dari pendukung  
acara Rapat Persiapan Kegiatan Focus Group  
Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  
Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.  
5. Penutupan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan  
Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
- Kata Pembukaan : 1. Maksud dan Tujuan Kegiatan :  
Untuk melakukan diskusi untuk Sinkronisasi  
program dan Kegiatan FKDM di Tingkat Provinsi  
dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat.

2. Peserta kegiatan  
Kegiatan ini akan diikuti oleh 40 (Empat puluh) orang peserta, yang terdiri dari Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta Pejabat Struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan:
  - Waktu pelaksanaan kegiatan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dimulai pada pukul 07.30 WIB - selesai.
  - Tempat pelaksanaan di Ruang Smokey Quartz Lantai C Hotel Golden Tulip, Jl. Teuku Umar Pontianak.
4. Tema Kegiatan :  
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Sebagai Intelijen di Daerah.
5. Susunan keanggotaan panitia pelaksana:
  - Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
  - Ketua : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
  - Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
  - Anggota :
    - Ahmadi, Pengelola Keuangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
    - Muhammad Husin, Pengelola Data Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
    - Muhammad Hidayat, S.Tr.IP, Pelaksana Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
    - Dwitho Hastaro, S.ST, Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.



- Sri Wahyuni, Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
- Wahyu Sukma Agung, A Md, Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Panitia pelaksana mempunyai tugas :

1. Penanggung jawab :
  - a. Memberikan arahan pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab pelaksana kegiatan;
  - d. Menetapkan Surat Keputusan kegiatan.
2. Ketua :
  - a. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Memberikan saran atau masukan dan monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan;
  - c. Menetapkan persetujuan atas Rencana dan Jadwal Kegiatan;
3. Sekretaris :
  - a. Menginventarisir urusan pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
  - b. Mendukung kelancaran tugas-tugas administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
  - c. Menyusun laporan data Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
4. Anggota :
  - a. Menghimpun atau menginventarisir bahan pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;
  - b. Mendukung kelancaran tugas-tugas administratif terhadap pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat;

- c. Mengadministrasikan surat menyurat berkenaan dengan pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
- d. Menyusun bahan-bahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Susunan pendukung acara :

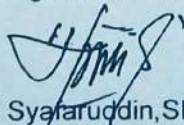
- a. Narasumber :
  - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat,
  - Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat,
  - Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Melawi,
  - Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sanggau atau yang mewakili.
- b. Moderator : Ir.Jakius Sinyor, Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Pembawa Acara : Rika Kartika Sari, A.Md.,Ak, Verifikator Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Notulis : Tri Haryani, SE, Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Dirigen : Yovita Ervina, S.Sos, Bendahara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Pembaca Doa : Wimal Abdy, A.Md, Pengelola Barang Milik Negara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

Penutup

: Penutupan acara oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat

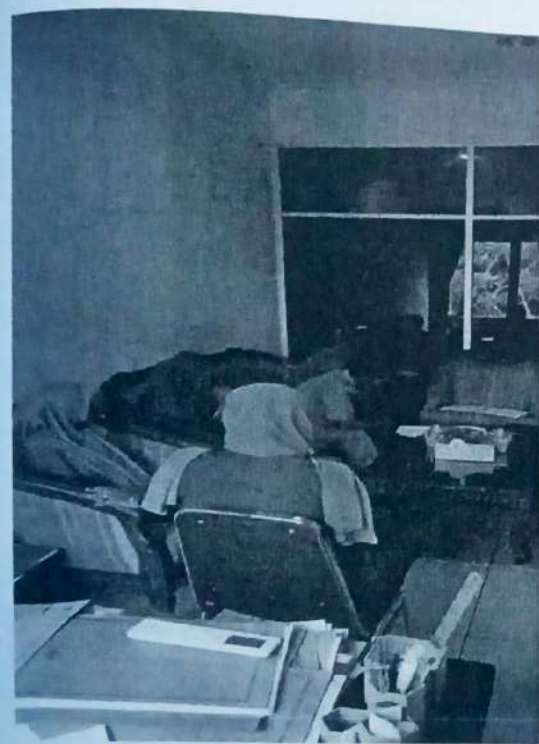
Pimpinan Rapat

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



Heri Syafaruddin, SE., ME  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19670529 198902 1 002

PARAF HIERARKI	
Analisis Kebijakan	
Pelaksana	





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736351 Faksimile (0561) 767242

Laman [www.kesbangpol.kalbarprov.go.id](http://www.kesbangpol.kalbarprov.go.id) Pos-el [kesbangpol@kalbarprov.go.id](mailto:kesbangpol@kalbarprov.go.id)

NOTULEN

- Kegiatan : Focus Group Discussion (FGD) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2023
- Hari/Tanggal : Rabu / 12 Juli 2023
- Surat Undangan : 200.1.3.1/675 /KESBANGPOL-E Tanggal 7 Juli 2023
- Waktu : 08.00 s/d 13.00
- Acara :  
1. Pembukaan  
2. Pembahasan  
3. Tanya Jawab Peserta  
4. Penutup.
- Pembuka Kegiatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
- Narasumber :  
1. Drs. Manto, M.Si  
2. Prof. Chairil Effendy, M.S  
3. AKBP Purnawirawan Marsianus Ajau  
4. H. Yeskil Leban, S.Pd., M.Si
- Moderator : Ir.Jakius Sinyor
- Pencatat : Tri Haryani, SE
- Peserta Kegiatan : Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat
- Pembukaan : Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat  
( **Heri Syafaruddin, SE., ME** )
- Yang saya hormati :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
  - Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Kalimantan Barat;
  - Para Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
  - Pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Barat;
  - Pengurus FKDM Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat;
  - Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr. Wb  
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul diruangan ini untuk melaksanakan Diskusi sinkronisasi Program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023.

Berkenaan dengan Kegiatan tersebut, izinkan saya melaporkan hal-hal sebagai berikut :

#### A. LATAR BELAKANG

Bahwa guna mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), diperlukan melakukan koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah baik pada Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kab/Kota se- Kalimantan Barat melalui Focus Group Discussion. Hal tersebut perlu dilaksanakan sebagai upaya dalam menyamakan persepsi dan pandangan guna meningkatkan peran dan sinergitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Nomor 121 jo Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Dalam permendagri tersebut di atas, diamanatkan juga tentang adanya kewajiban bagi Daerah untuk memberdayakan segenap unsur masyarakat, Peran serta unsur masyarakat secara nyata dilaksanakan dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Sehubungan hal tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan sinkronisasi Program Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk melakukan diskusi untuk Sinkronisasi program dan Kegiatan FKDM di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat.

#### C. PESERTA

Peserta kegiatan adalah Ketua Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pengurus Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat.

D. NARASUMBER

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat,
2. Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Barat,
3. Ketua FKDM Kabupaten Sanggau;
4. Ketua FKDM Kabupaten Melawi.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Terlaksananya kegiatan Focus Group Discussion Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023 guna mengembangkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta sinergitas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

F. PENUTUP

Demikian hal-hal yang dapat disampaikan, selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Barat untuk membuka secara resmi Kegiatan Focus Group Discussion Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023.

Sambutan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar (**Drs. MANTO, M.Si**)

Yang saya hormati :

- Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Kalimantan Barat;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak
- Para Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- Pengurus FKDM Provinsi Kalimantan Barat;
- Pengurus FKDM Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat;
- Undangan dan hadirin yang berbahagia.

*Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul diruangan

ini untuk melaksanakan Focus Group Discussion Kewaspadaan  
Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan  
Barat Tahun 2023.

*Hadirin dan Undangan yang berbahagia.*

Kita sebagai perpanjangan tangan intelijen di daerah. Kepala  
Kesbangpol menjadi pentingnya peran kita di kewaspadaan  
dini. Termasuk regulasi perlunya pembentukan FKDM kab/kota  
disupport dengan APBD. Saya berharap dimasa akan datang  
terus diupayakan ditengah dinamika ATHG. Berbicara tentang  
masalah ATHG saya tidak khawatir. Suatu ancaman yang  
memerlukan kewaspadaan dini. Sebagai contoh ancaman  
kewaspadaan dini di Kalimantan Barat contohnya kabut asap,  
banjir, puting beliung, gempa. Ini adalah ancaman, kemudian  
pandemi Covid-19 adalah ancamam. Dulu kita banyak  
mengalami kendala dalam menangani ancaman itu ada yang  
tidak setuju peananganan dengan vaksin dsb. Secara esensial  
kita yakin itu merupakan ancaman. Yang saya khawatirkan  
ATHG adalah sesuatu yang masi dalam mengukur,  
kebanyakan ini terkait dengan isu sosial. Kita dihadapkan  
dengan masalah yang dipandang dari sisi yang berbeda.  
memandang dari persepektif yang berbeda sehingga menjadi  
ancaman. Dalam kontek globl kondisi semacam ini sering  
digunakan pihak asing untuk melakukan propaganda untuk  
melemahkan negara kita. Terutama terhadap sumber daya  
ekonomi. Sumber kekayaan alam suatu Negara tidak semua  
merupakan anugrah tapi bisa menjadi musibah. Negara-negara  
yang kaya SDA menarik bagi mereka untuk melakukan  
kolonialisasi. Kita merupakan negara korban kolonialisme. Ini  
contoh sumber daya alam sebagai musibah. Tapii tidak sedikit  
negara negara yang menjadikan sda sebagai anugrah.

Seringkali kita hanyut oleh fenomena kekuasaan cenderung  
membentuk system yang koruptif, memperkaya diri sendiri, ini  
yang membuat pemimpin tergoda. Pada suatu titik kita berada  
pada sisi itu kita tidak bisa membaca karna kita bagian dari itu.  
Misal dalam kasus sebagai penguasa kita menikmati manfaat  
ekonomi dari sumber daya itu menyebabkan ssaya tidak mau  
melepaskan bahkan melebihi kebutuhan hidup. Pada saat itu  
kekayaan dimanfaatkan utk kepentingn pribadai. Peran FKDM  
untuk mengidentifikasi itu adalah masalah.untuk mengantisipasi  
adanya masalah. Masalah-masalah sangat sulit mementukan  
misalnya saat ini di medsos sedang terjadi propaganda  
/profokasi dalam mempropagana otak kita agar mendukung  
mereka. Banyak konten-konten yang menjelekkkan lawan. Kita

digiring utk membenci pihak lain. Pada saat ini kita memerankan diri sebagai stabilator menyatukan mereka, katalitator dalam kontek sosial adalah peran FKDM agar kelompok yang tadinya terpecah pada dikotomi tersebut jadi baik kembali sehingga kita saling pengertian satu sama lain, komunikasi yang baik sangat diperlukan sebagai modal untuk merekatkan bangsa yang semakin terpolarisasi, saya mohon kesbangpol kabupaten kota untuk saling memberikan informasi

Fenomena sosial yang tumbuh secara alami harus disikapi secara arif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini harus disadari bersama bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kita hidup harus saling berdampingan, gotong royong, saling membantu yang mewarnai kehidupan masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak jaman dahulu, selain itu berbagai potensi ATHG harus selalu kita waspadai melalui deteksi dini dan dicegah melalui peran Aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Masyarakat.

Kekhawatiran terhadap gangguan disharmoni kehidupan berbangsa juga dirasakan semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan gejala intoleransi, berbagai kasus yang menunjukkan seakan bangsa ini tak terbiasa dengan perbedaan. Berbagai hal dapat memicu konflik seperti perbedaan dukungan dalam kontestasi politik, hingga perbedaan paham dan doktrin dalam suatu keagamaan.

Untuk menjamin terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi berbagai potensi ATHG, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang menyatakan bahwa untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat, melalui Focus Group Discussion Kewaspadaan Dini masyarakat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Untuk itu saya mengharapkan dengan diselenggarakannya Focus Group Discussion Forum ini agar mampu mengantisipasi serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan Pencegahan Dini sehingga tercipta stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi



Kalimantan Barat.

Disamping itu Saudara juga harus mampu mewujudkan semangat keterpaduan komponen dan lapisan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) keamanan dalam Negeri khususnya dalam memelihara Ketenteraman dan Keterlibatan masyarakat, serta dapat memberikan saran dan masukan serta rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

*Hadirin dan Undangan yang berbahagia.*

Saya berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dalam meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta dapat memperoleh bahan masukan dalam perumusan kebijakan melalui upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai bentuk potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah demi terciptanya stabilitas dan kermanan yang semakin kondusif di Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan mengucap: "Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Focus Group Discussion Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Barat Tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka".

Sekian dan terima kasih.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Pembahasan

PAPARAN NARSUMBER SESSI I , 2 & 3

### **PERAN FKDM SEBAGAI INTELIJEN DI DAERAH**

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat ( Drs. MANTO, M.Si)**

#### **LATAR BELAKANG**

- Lahirnya Uu No 17 Th 2011 Ttg Intelijen Negara Serta Perpres No 67 Th 2013 Ttg Koord Intelijen Negara Dan Perkabin No 01 Th 2014 " Seluruh Kegiatan Intelijen Dikoordinasikan Oleh Bin/Binda"
- Dalam Kaitannya Dgn Pengaturan Permendagri No 11 Th 2006, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Yg Semula Di Bawah Koordinasi Pemda Berubah Menjadi Komite Intelijen Daerah Dengan Binda Sebagai Koordinator
- Selanjutnya Hal Tsb Berdampak Perubahan Paradigma Dimana Semula Pemda Melalui Kesbangpol Sbg

Pengguna/Penerima Info Dari Sat Intel Terkait Kondisi Di Daerah, Sekarang Menjadi Pemasok Info Intel Terkait Sikon Daerah Untuk Mendukung Posisi Kesbangpoi Sbg Anggota Kominda Dalam Memberikan Info Terkait Kondisi Daerah Maka Diperlukan Membentuk Tim/Satuan Tugas Internal Pemda.

- PERMENDAGRI 11 TAHUN 2006 JO PERMENDAGRI 16 TAHUN 2011 TENTANG KOMINDA
- PERMENDAGRI 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
- PERMENDAGRI NO.02 TAHUN 2018 DAN PERMENDAGRI 46 TAHUN 2019 TTG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT KEWASPADAAN DINI DI DAERAH**

##### **PROVINSI**

- Kewaspadaan Dini Di Provinsi Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Gubernur
- Tim Kewaspadaan Dini Daerah Provinsi
- Fkdm Provinsi

##### **KAB./KOTA**

- Kewaspadaan Dini Di Kabupaten/Kota Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Bupati/Walikota
- Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kab/Kota
- Fkdm Kab/Kota

##### **KECAMATAN**

- Kewaspadaan Dini Di Kecamatan Dilaksanakan Oleh Camat
- Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kecamatan
- Fkdm Kecamatan

DILAKUKAN MELALUI KOORDINASI DAN SINERGITAS TIM KEWASPADAAN DINI PEMDA DENGAN PENGEMBAN FUNGSI INTELIJEN NEGARA

#### **Kewaspadaan Dini :**

Serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

#### **POTENSI ATHG YANG PERLU DIANTISIPASI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Politik, Ekonomi, Dan Sosial Budaya

- Perseteruan Antarumat Beragama Dan/Atau Interumat Beragama, Antarsuku, Dan Antaretnis
- Sengketa Batas Wilayah Desa, Kabupaten/Kota, Dan/Atau Provinsi
- Sengketa Sumber Daya Alam Antar Masyarakat Dan/Atau Antar Masyarakat Dengan Pelaku Usaha
- Distribusi Sumber Daya Alam Yang Tidak Seimbang Dalam Masyarakat

#### **FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)**

- ✓ Fkdm Dibentuk Di Prov, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Desa.
- ✓ Pembentukan Fkdm Dilakukan Oleh Masy & Ditetapkan Oleh Pemda
- ✓ Fkdm Memiliki Hub Yg Bersifat Konsultatif Dan Merupakan Akses Informasi Bagi Tim Kewaspadaan Dini Pemda
- ✓ Fkdm Sebagai Akses Informasi Berkoordinasi Dan Memberikan Info Kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemda

**Keanggotaan FKDM Prov, FKDM Kab/Kota, dan FKDM Kec, FKDM Kel/Desa sesuai dengan kebutuhan terdiri dari : wakil ormas, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, atau elemen masy lainnya**

#### **TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)**

- Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
- Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur, bupati/walikota, camat atau lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat antara lain :
  1. Sebagai ujung tombak dalam pengumpulan informasi terkait dengan potensi ancaman didaerahnya
  2. Sebagai mata dan telinga serta membantu penyelenggaraan pemerintahan didaerah
  3. Membantu pencegahan awal terhadap ancaman didaerahnya.
  4. Sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
  5. Temu Cepat dan Laport Cepat

#### **SISTEM TEMU CEPAT DAN LAPOR CEPAT BAGI FKDM**

Fungsi deteksi dini : koordinasi dengan forum2 dan jaringan komunitas intelijen secara optimal, karena hal tsb merupakan fungsi yang sangat sentral dalam upaya pencegahan dini

terhadap gangguan-gangguan dalam masyarakat.

Perspektif intelijen : penyelidikan yang menggunakan metoda deteksi dini (temu cepat) dan prinsip "velox at exatus" (cepat dan akurat) dalam pelaporan (lapor cepat), maka intelijen dapat terhindar dari pendudukan. Demikian halnya dengan FKDM, jika prinsip "temu cepat" dan "lapor cepat" menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi FKDM, maka peran FKDM menjadi sangat elementer dalam mengantisipasi datangnya ancaman.

Fungsi kewaspadaan dini : kemampuan mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan cepat.

Cth :

1. Di bidang ideologi, fokus pada penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
2. Di bidang politik, melakukan pemetaan kekuatan politik dan elemen yg berpengaruh terhadap dinamika politik, serta penataan peran masyarakat sipil (civil society).
3. Di bidang ekonomi, mencermati fluktuasi kenaikan harga sembilan bahan pokok,
4. Di bidang sosial dapat dilakukan dengan pemetaan daerah rawan pangan, rawan penyakit, rawan bencana alam, rawan penduduk, rawan kriminal dan lain-lain,
5. Di bidang pertahanan keamanan dapat dilakukan dengan pemetaan daerah basis kriminal, membuat sistem keamanan lingkungan dan lain-lain

Rencana Program Kerja Th 2024

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) KALIMANTAN BARAT

( Ketua FKDM Provinsi Kalimantan Barat Prof Dr. Chairil Effendy, M.S )

Latar Belakang

- Kalbar merupakan provinsi dengan kondisi kerawanan bencana yang unik dibandingkan banyak daerah lain.
- Provinsi ini memiliki kerawanan bencana selain yang berasal dari alam, tapi juga kerawanan bencana sosial.

Saat ini bencana alam di Kalbar frekwensinya meningkat ada penurunan kualitas alam kita, gempa bumi juga sudah masuk di kalbar seperti di Singkawang. Termasuk penerbangan kita juga sudah mulai rawan, serta kebakaran lahan

- Pemilu serentak tahun 2024 meningkatkan potensi kerawanan konflik sosial.

Untuk itu, FKDM Kalbar menyiapkan sejumlah program utk mengantisipasinya. Serta dengan terus komunikasi

## mengadakan pertemuan-pertemuan

### Tujuan

1. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi bencana alam,
2. Meningkatkan penanganan konflik sosial di Provinsi Kalbar
3. Memperkuat kerjasama antar kelompok etnis atau agama untuk memperkuat toleransi, kerukunan, dan saling pengertian.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial antaretnis/agama. Pertemuan semacam ini di daerah semoga bisa segera dilaksanakan.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap FKDM sebagai lembaga yang peduli dan aktif menjaga perdamaian dan kerukunan sosial di Provinsi Kalbar.

### Program Kerja

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat, melalui kerjasama pertemuan-pertemuan seperti di forum ini, FPK, PMP,
- Pembuatan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini,
- Penguatan Kerjasama Antar Lembaga, selama ini kita diikuti dalam rapat-rapat di BINDA
- Pemantauan dan Evaluasi

### Penanganan Konflik Sosial

#### Peningkatan Kesadaran Masyarakat

- Mengadakan sosialisasi dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan dini dalam menghadapi bencana alam dan sosial.
- Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat mengenai tindakan-tindakan kewaspadaan dini dalam menghadapi bencana alam.
- Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai penanganan konflik sosial.

#### Pembuatan Sistem Informasi Kewaspadaan Dini

- Identifikasi kebutuhan dan sumber informasi
- Perancangan dan pengembangan sistem
- Uji coba sistem
- Pelatihan dan sosialisasi
- Evaluasi dan perbaikan

#### Penguatan Kerja Sama Antarlembaga

- Membuat forum koordinasi antar lembaga

- Membuat program pelatihan bersama
- Membuat protokol kerjasama
- Meningkatkan sinergi dengan LSM dan lembaga donor
- Membuat sistem monitoring dan evaluasi

#### Pemantauan dan Evaluasi

- Menentukan Indikator Keberhasilan
- Pelaksanaan Monitoring
- Evaluasi Berkala
- Perbaikan atau Perubahan Program

#### Penanganan Konflik Sosial

- Pelatihan dan Workshop bagi anggota FKDM
- Pelatihan dan Workshop bagi anggota FKDM
- Menyusun modul pelatihan
- Mengadakan workshop
- Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial
- Menyusun panduan operasional untuk tim penanganan konflik sosial
- Melakukan pelatihan dan simulasi terhadap anggota tim penanganan konflik sosial
- Penyediaan Sarana dan Prasarana
- Membangun pusat informasi dan advokasi bagi korban konflik
- Menyediakan posko penanganan konflik sosial yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

FKDM SANGGAU, Wakil Ketua FKDM Sanggau (AKBP Purnawirawan Marsianus Ajau)

Wilayah : 15 Kecamatan, sudah dibentuk tahun 2023 6 Kecamatan. Bantuan Hibah dari Pemda 50 Juta dalam proses

#### Program Kerja :

1. Menyerap informasi dari berbagai lapisan masyarakat (Pertemuan-pertemuan dengan lapisan masyarakat, Coffee Morning , rapat pengurus buanan, dan FGD)
2. Koordinasi dengan FKDM Provinsi Kalbar
3. Mengikuti Kegiatan yang diadakan pemerintah daerah yang bersifat koordinasi dan lainnya, termasuk undangan FGD yang diselenggarakan FKDM Kalbar
4. Rencana Kerjasama Pelatihan dengan BIN Sanggau dalam upaya melatih dan mengolah data informasi sehingga menjadi informasi yang valid

5. Koordinasi dengan Forkopimda

Beberapa Permasalahan yang ada di Kabupaten Sanggau

1. Perlintasan jalan Narkoba ( masuk melewati border Indonesia Malaysia/Intikong). Sehingga menempatkan sanggau sebagai titik rawan peredaran narkoba
2. Masalah perdagangan orang(TKI/Illegal)
3. Perjudian Online yang meresahkan (Judi Slot dll). Bahkan ada usia remaja di Kota sanggau yang terilit hutang ratusan juta mengatas namakan orang tuanya hanya untuk membeli chip yang digunakan untuk judi online, FKDM Sanggau dalam hal ini mendorong mpemerintah pusat/menkominfo untuk bisa memblok situs-situs judi online tersebut yang bisa merusak bukan saja orang dewasa
4. Kerawanan saat Pilkada, jangan sampai terjadi politik identitas

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH  
KABUPATEN MELAWI, KETUA FKDM MELAWI (H. Yeskil  
Leban, S.Pd., M.Si)**

Konflik paling rawan konflik agraria dan konflik narkoba serta tindak pidana perdagangan orang

Kerawanan sosial jangka pendek adalah terkait persoalan Pemilu

Terjadi perdebatan politik identitas. Politik identitas sebenarnya diperbolehkan tapi jangan sampai konflik sara

Program Kerja

1. Sosialisasi
2. Pembentukan FKDM Tingkat Kecamatan, sasarannya Forkopimcam, identifikasi dini ATHG

Terkait perkembangan teknologi ada perkiraan hp bisa dicopot-cipot layar bisa diganti-ganti langsung mendeteksi mengenal orang di belakangnya dsb sehingga bisa menghilangkan sebagian pekerjaan. Kecerdasan artifisial intelegensi, ANI artifisial inteligen, AGI Artifisial general inteligen sudah lebih cerdas dari manusia biasa mengambil pekerjaan manusia. Karena perkembangan teknologi itu kita harus bisa beradaptasi. ASI Artifisial Super Inteligen. Kemajuan teknologi harus dibarengi kemampuan intelegensi, kita hanya perlu menyesuaikan diri.

**Moderator**

- Kita tidak keluar dari aturan yang ada
- Ada permasalahan di 14 Kab/Kota pada intinya kita perlu koordinasi, Konsolidasi internal & eksternal, kemudian masalah pembinaan Masalah inti saat ini masalah menghadapi pemilu yang kita perlukan pembekalan, penanganan konflik

## TANYA JAWAB SESI 1 & 2

Penanya 1  
Syafaruddin,  
Kesbangpol  
Kabupaten Ketapang

1. Masalah program hampir semua daerah sama. Termasuk Masalah penanganan konflik. Masalah deteksi dini, kami kemarin mendeteksi masalah pilkades. Sekarang ini ada aliran keagamaan yang akan menghasilkan Bom waktu seperti Yayasan Al Zaitun, LDII dan lain-lain. Hal seperti ini akan merusak generasi selanjutnya. Kelemahan kita tidak pernah dibekali senjata. Saya baru 2 bulan mengelola kebijakan negara. Kalau menurut negara penting kesbangpol jangan diobok-obok seperti baru beberapa bulan sudah dipindahkan.
2. Simantel dan pemasalahan-permasalahan yang terjadi rekomendasinya kemana apakah ke bupati atau gubernur
3. Masalah pakem, ketapang luas
4. Ada 900 kendaraan mandeg di jalan, jadi bukan hanya masalah narkoba, judi online

### Tanggapan Narasumber :

( Ketua FKDM Kalbar Prof. Chairil Effendy, M.S)

- FKDM Provinsi rekomendasinya ke Gubernur, FKDM Kabupaten/Kota ke Bupati/Walikota
- Terkait Al Zaitun, kita tunggu penyelesaiannya, LDII ke MUI, Kemenag sudah menerbitkan Buku Referensi Tahun 2021 tentang aliran agama mana yang dianggap keliru dsb ada dalam buku tersebut.
- Kita informasikan dan rekomendasikan ke Bupati/Gubernur eksekusinya mereka BIN. FKDM betul-betul mengabdikan diri ke masyarakat bantuan yang didapat bantuan program, kita bekerja sesuai aturan yang berlaku sesuai kewenangan yang diberikan kepada kita. Jangan terlalu kita pusingkan jangan terlalu jauh.

### Tanggapan Narasumber :

( Wakil Ketua FKDM Sanggau AKBP Purn. Marsianus Ajau)

- Untuk penangan Masalah Narkoba sebaiknya tertutup jangan terbuka karna mereka dapat menyerang balik kita
- Dalam pemilu kita juga tidak bisa terbuka tapi gunakan cara tertutup karena keluarga kita juga ada yang mencalonkan. Lapor saja ke kesbangpol

### Tanggapan Narasumber :

( Ketua FKDM Melawi H. Yeskil Leban, S.Pd., M.Si)

- Terkait money politik kita memilih orang yang sudah disodorkan mungkin itu bukan pilihan kita, tapi karena sudah disodorkan. Jangan lah kita terlalu fanatik sampai ada istilah cebong/kadrun dsb.
- Terkait politik identitas kita perlu itu tetapi yang penting jangan sampai menimbulkan konflik



Penanya 2:  
SILVANUS,  
Kesbangpol Landak

1. Ada 2 persoalan bagaimana mengurangi Money Politik di 2024 dan politik identitas. Solusi untuk politik uang mungkin akan berkurang jika ada yang memberikan uang ambil saja tapi pilihan terserah saja.
2. Waktu Sosialisasi kita memang dibaik-baiki oleh pengusaha. Sementara kenyataannya hasilnya tinggal 20% yang dibagikan ke masyarakat. Kalbar merupakan sasaran konglomerat di Jakarta

Tanggapan Narasumber :

( Ketua FKDM Prof. Chairil Effendy, M.S)

- Terkait Politik Identitas tidak bisa kita hindari yang penting tidak menimbulkan konflik. Karakter bangsa kita memang seperti itu, kembali ke agama untuk menciptakan akhlak yang baik.
- Terkait Money Politik, terkait petugas yang kelelahan dan meninggal, jangan berfikir macam-macam

Penanya 3 :  
ANTONIUS, Kaban  
Kesbangpol Sanggau

1. Berkaitan dengan FKDM di kabupaten Sanggau terkait peraturan perundang-undangan bahwa diamanatkan pembentukan berbagai macam forum seperti FKUB, FPK termasuk FKDM. Dan di sanggau telah terbentuk sampai tingkat kecamatan. Keberadaan forum ini kita berharap forum ini melaksanakan tupoksinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dengan melakukan upaya pencegahan kerawanan konflik baik di pemilu presiden maupun pemilukada
2. Berkaitan dengan penanganan konflik sosial, kita tidak melihat ketentuan yang lebih jelas yang mengatur suatu konflik. Karena itu perlu petunjuk suatu kejadian potensi konflik. Kami punya kewajiban melaporkan kejadian-kejadian di daerah, kami perlu mengetahui indikator apakah kejadian tersebut masuk konflik atau tidak, misalnya demo unjuk rasa apa itu dikategorikan termasuk konflik sosial. Diperlukan pembatasan kriteria untuk kejadian yang masuk konflik sosial

Tanggapan Narasumber :

( Ketua FKDM Kalbar Prof. Chairil Effendy, M.S)

- Banyak Forum baik sebagai ajang komunikasi maupun sebagai forum menyelesaikan masalah
- Konflik sosial yang seperti apa konflik sosial yang bisa menyebabkan kekerasan konflik perkebunan bisa termasuk konflik. Demo silahkan tapi jangan anarkhis
- Jangan sampai terjadi konflik dengan kekerasan. Kita hanya dalam rangka antisipasi
- Kita jangan sampai melangkahi kewenangan kita

Penanya 4  
SUWARTO, FKDM  
Kabupaten Kuburaya

1. ATHG kuncinya komunikasi
2. Ukhuwah Islamiyah, menjaga toleransi  
Sebelum NKRI dulu adalah kerajaan-kerajaan NKRI masuk Tahun 78. Kita sebagai masyarakat NKRI wajib menjaga

Penanya 5  
YAKOBUS,  
Kesbangpol  
Bengkayang

NKRI sebagaimana kita berkerja dengan tupoksi kita masing-masing. Di Era reformasi, saran di polres ada nomor kontak yang bisa dihubungi masyarakat agar masyarakat tidak segan melaporkan hal-hal mencungakan

1. Terkait pengelolaan keuangan FKDM perlu bendahara atau bagaimana
2. Kami sarankan ada pendekatan di daerah ada trend pergeseran konflik
3. Terkait ijin perkebunan hak ulayat tanah proses ketika dihadapkan pada penegakan hukum Lembaga masyarakat berhadapan dengan aparat penegak hokum

**Tanggapan Narasumber**

( Kabid KNPK Badan Kesbangpol, Heri Syafaruddin, SE., ME )

- Kita menyerahkan hibah kepada FKDM yang mempunyai referensi Bank, Kemudian laporan kita kumpulkan kepala badan melaporkan kepada gubernur untuk disampaikan ke kemendagri. Kita juga sering mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan BINDA biasanya saya meminta informasi kepada FKDM yang bersangkutan untuk disampaikan kepada BINDA

Pimpinan Sidang/Rapat  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Drs. Manto, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670221 198603 1 004

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
Kasubbag/JF/Pelaksana*	

FOCUS GROUP DISCUSSION

# **FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE- KALIMANTAN BARAT**

"FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
SEBAGAI INTELIJEN DI DAERAH"

PONTIANAK, 12 JULI 2023

